Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN
PKB
PKS
VISI, MISI & PROGRAM KERJA
Indonesia Adil Makmur untuk Semua
ANIES RASYID BASWEDAN
ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

GGAL 19 SEPTEMBER 1945 ....
ELIHAT BENDERA MERAH PUTIH-BI-
BAR KEMBALI DI HOTEL ORANYE (YA-
TEL).KEMARAHAN RAKYAT DAN PEMU-
UDA DI SURABAYA TIDAK TERTAHAN
ENGAN SEREMPAK RAKYAT BERGERAK
NA MENJADI PANAS. JALAN TUNJU-
MENJADI LAUTAN MANUSIA YANG
ELORA ....
TERJADILAH ......
INSIDEN BENDERA, FAJAR PERMULAAN MELE -
TUSNYA API REVOLUSI. KARENA RAKYAT HA -
NYA MENGHENDAKI SUPAYA SANG DWI WARNA ME-
RAH-PUTIH SAJA YANG BERKIBAR DI ANGKASA
INDONESIA, SEDANG SI-TIGA WARNA HARUS TURUN....
KEMUDIAN ......
BERKIBARLAH SANG DWI WARNA HINGGA DETIK SEKA -
RANG DAN UNTUK SETERUSNYA SEBAGAI LAMBANG KE-
MEGAHAN DAN KEJAYAAN NUSA DAN BANGSA INDONESIA

Daftar Isi

VISI, MISI & PROGRAM

Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar

Fondasi dan **Arah Perubahan**

Indonesia Emas 2045! Ini bukan slogan indah yang hampa. Ini adalah cita-cita tentang masa depan yang gemilang buat seluruh anak bangsa. Kita harus mencapai kegemilangan itu, ketika usia Proklamasi Kemerdekaan RI mencapai 100 tahun. Negeri tercinta kita ini akan mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan negara yang maju, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia tumbuh dari perjuangan. Keberhasilan perjuangan melawan penjajah mengandung hikmah yang dalam tentang karakter kita sebagai bangsa. Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikaruniai semangat juang, percaya pada kerja keras, serta selalu menekankan pentingnya kecerdasan yang matang secara emosional dan spiritual.

Sejarah para leluhur kita adalah sejarah perlawanan terhadap kezaliman. Dari gelora Laksamana Malahayati yang memimpin 2.000 Inong Balee (pasukan janda pahlawan Aceh) melawan armada laut Portugis (1599), hingga pekik takbir Pangeran Diponegoro yang membuat bangkrut bala tentara Belanda di medan Perang Jawa (1825-1830). Dari keberanian Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur yang memimpin Perang Makassar (1666-1669), ketangguhan I Gusti Ketut Jelantik mempertahankan Pulau Dewata dari gempuran Belanda (1849), hingga keteguhan hati rakyat Papua untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (1969).

Para leluhur kita adalah para pejuang yang sadar sesadar-sadarnya akan hak dan tanggung jawab atas tanah airnya. Kesadaran dan rasa tanggung jawab inilah yang diwariskan turun-temurun kepada anak, cucu hingga generasi kita sekarang. Perjuangan harus terus berlanjut, tidak boleh surut.

Satu Bangsa, Satu Negara, Satu NKRI dan Satu Tanah Air

Ketika tekanan dan penderitaan akibat penjajahan berkelanjutan, para pendahulu kita mengambil satu langkah besar yang sangat instrumental: berserikat! Pelan-pelan, kalangan terpelajar mengubah gaya perjuangan, menggeser identitas kedaerahan dan bersatu melalui tajamnya pisau organisasi dan pemikiran.

Lahirlah Boedi Oetomo (1908), diikuti Sarekat Dagang Islam (1911) yang bertransformasi menjadi Sarekat Islam, lalu para pelajar mendirikan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia atau PPPI (1926). PPPI inilah yang menggelar Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres Pemuda II (1928) di Batavia. Di Kongres Pemuda II itulah Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda: bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menandai lahirnya kita sebagai **SATU BANGSA**.

"Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?" tanya ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dr. Radjiman Wedyodiningrat, akhir bulan Mei 1945. Pertanyaan ini teramat fundamental, menyoal ruh yang akan ditiupkan ke badan republik sedari awal. Pertanyaan itu merupakan awal pembicaraan panjang mengenai dasar dan konstitusi negara kita.

Satu dari sedikit anggota yang tampil menguraikan dasar negara atau "*philosofische grondslag*" di muka sidang ialah Bung Karno. Pidato 1 Juni 1945 sang penyambung lidah rakyat dibalas tepuk tangan yang riuh bergemuruh. Esensi pidato itulah yang akhirnya "ditumbuk" bersama panitia kecil sehingga melahirkan Pancasila, dasar berdirinya negara kita. Rangkaian pertemuan, musyawarah dan perjuangan para pendiri bangsa ini terkulminasi dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang melahirkan Indonesia sebagai **SATU NEGARA**.

Satu Bangsa

1928

Satu Negara

1945

Tapi Belanda belum rela, mereka ingin menghidupkan kembali pendudukan dengan mendorong konsep negara persemakmuran. Mereka hanya mengakui kedaulatan RI untuk wilayah Jawa, Sumatra dan Madura. Melalui serangkaian upaya, Belanda merayu para perwakilan dari berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung pembentukan negara federal dengan taktik lama, *devide et impera*.

Belanda menggunakan dua strategi sepanjang 1947-1949, yaitu diplomasi serta agresi militer. Kepiawaian para tokoh Indonesia mengundang simpati masyarakat internasional dan berhasil melibatkan PBB untuk menengahi. Dalam Konferensi Meja Bundar (1949), pemerintah Indonesia secara taktis menyetujui dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terbagi dalam tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan.

Berbulan-bulan Mohammad Natsir, melobi para pimpinan fraksi di parlemen dan menemui tokoh-tokoh di daerah. Misinya tunggal: mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan Mosi Integral di parlemen yang berisi desakan untuk mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan. Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohammad Hatta menerima dengan baik Mosi Natsir dan bahkan menyebutnya sebagai "Proklamasi Kedua". April hingga Mei 1950, satu persatu negara bagian dan satuan kenegaraan menggabungkan diri kepada Republik Indonesia. Mosi Integral Natsir menandakan lahirnya kita sebagai
SATU NKRI.

Tetapi, sebagai negara kepulauan, Indonesia hanya menguasai wilayah daratan pulau-pulau dan wilayah perairan yang hanya tiga mil dari garis pantai, mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939*. Indonesia telah bersatu dalam kerangka NKRI, tapi kapal-kapal asing bebas melintas perairan kita di luar batas tiga mil. Pulau-pulau bukan direkatkan tapi dipisahkan oleh laut, kedaulatan kita belum sempurna.

Pada 13 Desember 1957, Djoeanda Kartawidjadja membuat pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak sendiri. Oleh karena itu, wilayah Indonesia mencakup laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, semua menyatu dalam kesatuan kedaulatan wilayah NKRI. Pada awalnya, Deklarasi Djuanda ini tidak mendapatkan dukungan dunia, diperlukan perjuangan 25 tahun lamanya, hingga akhirnya dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut II 1982 (UNCLOS 1982); Mochtar Kusumaatmadja merupakan tokoh kunci dibalik sukses ini.

UNCLOS memberikan pengakuan atas Laut Teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis pantai serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Djoeanda tak sempat melihat langsung mimpinya menjadi kenyataan karena wafat pada 1963 dan perjuangannya dilanjutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Deklarasi Djuanda 1957 menjadi awal dari munculnya UNCLOS 1982, menandakan kelahiran Indonesia sebagai **SATU TANAH AIR.**

Satu
NKRI

1950

Satu
Tanah Air

1957-1982

HARI INI

Belum Satu Kemakmuran

Belum Satu Kemakmuran

Tahun ini kita telah memasuki usia kemerdekaan yang ke-78. Kedaulatan sudah bulat dan penuh di tangan, berbagai capaian pun telah diraih sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Kendati pun kita masih memiliki begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Kita berhasil menjadi satu bangsa, satu negara, satu NKRI dan satu tanah air. Namun, ada satu hal yang masih samar dalam mozaik perjalanan Indonesia, **Satu Kemakmuran**. Masih banyak rakyat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak dan terjangkau. Kemiskinan masih sangat kasat mata, pengangguran ada di mana-mana. Di lain sisi, ketimpangan ekonomi dan kesempatan masih sangat menganga.

Rakyat di Pulau Jawa secara umum mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah dan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan rakyat di luar Jawa, apalagi di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Mereka yang tinggal di gugusan kepulauan nusantara harus merantau demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas, faktanya 9 dari 10 kampus terbaik Indonesia ada di Pulau Jawa. Banyak daerah kehilangan talenta terbaik mereka karena tersedot oleh kesempatan yang dijanjikan kota-kota besar, terutama di Jawa; padahal idealnya mewujudkan mimpi dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.

Tuhan Maha Pemurah, Ia mengkaruniai Indonesia alam yang indah, ramah dan kaya. Pangan, migas, kelapa sawit, batu bara, mineral, hasil laut dan sederet hasil alam lainnya membuat dunia terpesona. Sayangnya, manfaat dari kekayaan alam itu tidak dirasakan secara adil dan merata. Mereka yang tinggal di sekitar kekayaan alam itu berada, seringkali tidak ikut terlibat dalam rantai pasok ekonomi, walau mereka ikut merasakan dampak lingkungan yang diakibatkan. Di atas kertas, laut menyatukan pulau-pulau kita, tetapi realitanya, mengirimkan hasil bumi dari Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua ke Jawa atau pulau-pulau lainnya, jauh lebih mahal daripada mengirimkan produk yang sama dari Australia, Tiongkok, India, atau Pakistan.

Kualitas hidup di desa hampir selalu lebih buruk daripada di kota dan hubungan antara kota dan desa cenderung eksploitatif. Sektor pertanian dan kelautan yang teramat penting dan mempekerjakan sekitar 30% tenaga kerja kita, justru menjadi simpul kemiskinan. UMKM dan Koperasi yang semestinya menjadi motor kesejahteraan masyarakat, tidak mampu berperan karena belum diperankan.

Para pendiri bangsa dan pemimpin-pemimpin terdahulu telah menanamkan fondasi yang kuat. Tugas kita ke depan adalah mewujudkan keadilan sosial yang sebenarnya, melalui **Satu Kemakmuran**. Kondisi di mana kesejahteraan diwujudkan secara berkeadilan. Kondisi di mana negara membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kondisi di mana setiap keluarga berkecukupan dalam kebutuhan dasar, bisa menabung dan bisa merencanakan masa depan.

"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Sila Ke-5 Pancasila

Pentingnya Kualitas Manusia

Kekuatan terbesar bangsa ini untuk mewujudkan kemajuan adalah manusianya. Dari segi jumlah, Indonesia masuk lima besar populasi dunia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta, di bawah India dan Tiongkok (masing-masing sekitar 1,4 miliar), dan Amerika Serikat (340 juta). Jumlah populasi ini membuat Indonesia berpengaruh secara geopolitik dan geostrategis.

Sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 191 juta jiwa atau 70,7% dari total penduduk. Besarnya porsi penduduk usia muda ini disebut "bonus demografi", kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Persoalannya, bonus demografi akan menjadi keuntungan jika kita berhasil mewujudkan generasi muda terdidik dan berkualitas. Jika tidak, ia akan berubah menjadi "tsunami demografi".

Faktanya, generasi muda belum mendapatkan pendidikan bermutu, bahkan mayoritas hanya lulusan SD. Sekitar 80% populasi Indonesia berpendidikan terakhir SMP, hanya 6,4% yang mengenyam pendidikan tinggi. Dari segi kompetensi, menilik Skor PISA (Program for International Student Assessment) terakhir tahun 2018, siswa kita bahkan menunjukkan penurunan skor di semua area, yaitu membaca, matematika, dan sains. Dalam peringkat Global Talent Competitiveness Index 2022, Indonesia berada di urutan ke-82 dari 133 negara di dunia, di bawah negara tetangga ASEAN lainnya.

Indonesia harus melakukan investasi yang serius untuk menaikkan kualitas dan akses pendidikan. Laboratorium sains, bengkel kerja, dan perpustakaan harus dibangun di semua sekolah yang membutuhkan. Anggaran dan daya saing riset perlu ditingkatkan. Guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kunci perbaikan kualitas pendidikan penting untuk diperbaiki kompetensi dan kesejahteraannya, termasuk dengan mengangkat guru honorer yang menunjukkan kinerja yang baik.

Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan

Kemiskinan adalah masalah berat berikutnya. Sekitar 7 dari 10 (68%) orang Indonesia atau 187 juta warga tidak mampu membeli makanan dengan gizi seimbang. Sekitar 8 dari 10 petani Indonesia tergolong petani gurem dan kecil dengan penguasaan lahan di bawah 2 hektar. Karena kemiskinan pula, 1 dari 5 balita Indonesia mengalami *stunting*. Kesehatan fisik dan mental masih menjadi masalah. Keduanya kebanyakan berakar dari isu kemiskinan, sehingga mengatasi kemiskinan artinya mengatasi banyak masalah di masa mendatang.

Persoalan kemiskinan erat hubungannya dengan masalah pengangguran yang kian hari kian mengkhawatirkan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 8 juta orang di Indonesia yang menganggur. Angka ini pun problematik, karena diukur dengan kriteria pengangguran yang sangat longgar, di mana orang dianggap bekerja apabila dalam seminggu terakhir bekerja minimal 1 jam, baik dibayar atau tidak. Realitasnya, angka pengangguran melejit di atas 50 juta jika kriteria bekerja dinaikkan menjadi 35 jam seminggu dan dibayar.

Sekitar 76% pengangguran adalah lulusan SD dan SMP, ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Hal ini perlu segera diatasi dengan intervensi di dalam sekolah melalui perbaikan sarana praktikum ataupun di luar sekolah melalui kelas industri dan balai pelatihan kerja yang modern. Proses pendidikan dan pelatihan harus relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

Masalah kemiskinan dan pengangguran membuka lebar jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kota-kota besar di Indonesia menjadi tempat di mana ketimpangan sosial dan ekonomi tergambar jelas. Kota adalah tempat di mana orang-orang dengan kekayaan melimpah dapat hidup dengan nyaman, sementara di sudut-sudut kota, banyak keluarga miskin berjuang untuk sekadar hidup. Negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial agar tidak menjadi friksi dan konflik antar kelas.

Di tingkat nasional, ketimpangan tercermin dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut World Inequality Report 2021, rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia mencapai 1 banding 19, artinya populasi yang berada di kelas ekonomi paling atas memiliki pendapatan rata-rata sebanyak 19 kali lipat daripada pendapatan populasi yang berada di kelas ekonomi terbawah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki tingkat rasio 1 banding 17, serta Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Nigeria dengan rasio 1 banding 14.

Sementara itu, dalam hal distribusi kekayaan, 10% dari penduduk dengan tingkat kekayaan tertinggi menguasai sekitar 60% dari seluruh kekayaan rumah tangga. Lebih lanjut, 1% dari penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 29.4% dari total kekayaan tersebut. Laporan Credit Suisse tahun 2022 bahkan mengungkapkan fakta yang lebih dramatis, bahwa 10% penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 67% total kekayaan nasional, sedangkan 40% terbawah hanya menguasai 2,1% saja.

Belum lagi muncul fenomena baru yang berpotensi memperparah ketimpangan, yakni fenomena generasi sandwich. Generasi sandwich adalah pekerja produktif yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya secara utuh karena harus menanggung penghidupan keluarganya. Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan 71,6 juta jiwa atau 26,5% penduduk Indonesia adalah generasi sandwich. Dampaknya, generasi ini akan sulit mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan, dan memperparah ketimpangan.

Negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial
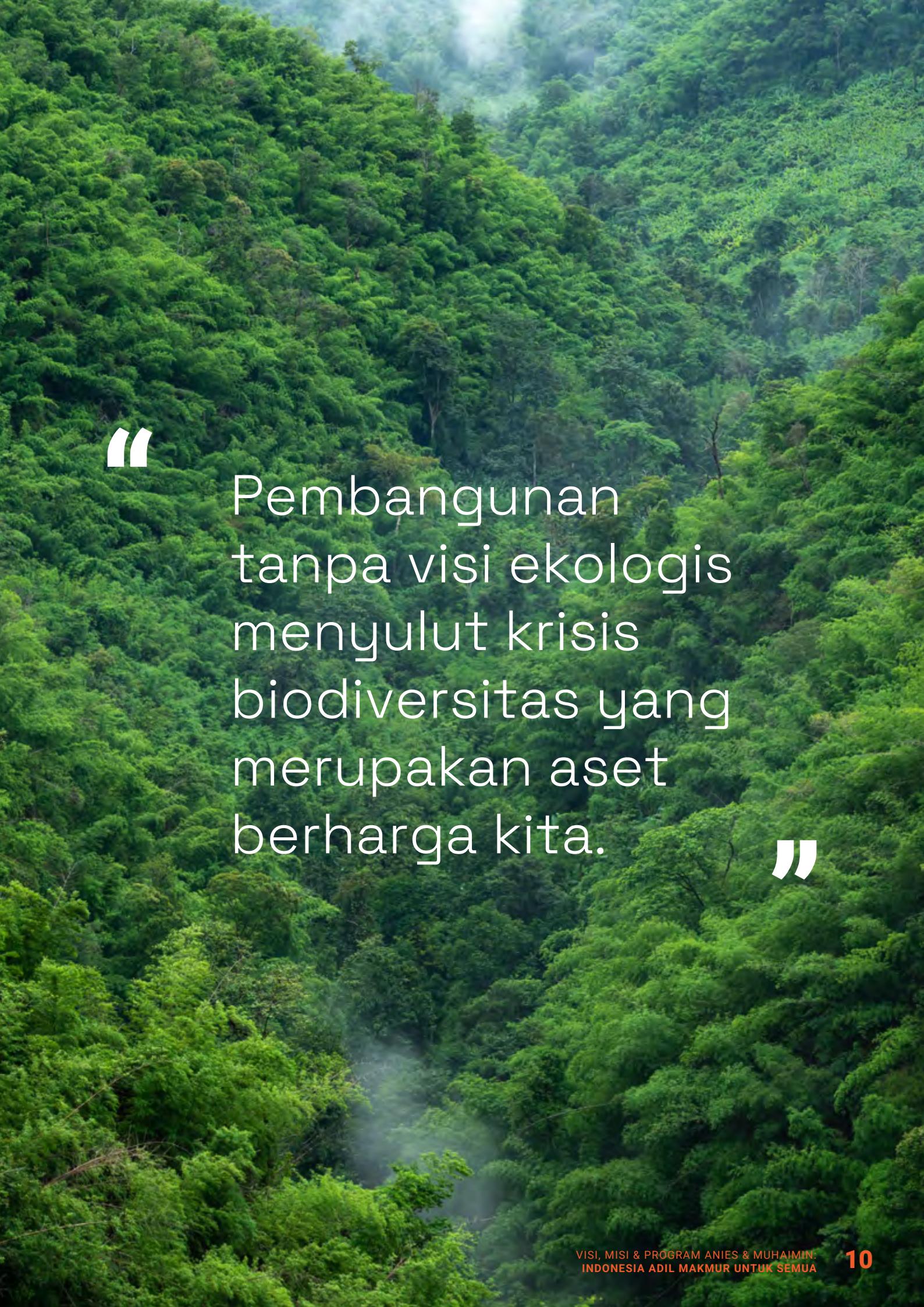
Krisis Iklim Global

Sebagai upaya mewujudkan kemakmuran, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia mengimplementasikan program pembangunan dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun praktik pembangunan yang terlalu agresif menghasilkan dampak lingkungan yang tidak kecil, yaitu terjadinya polusi skala besar dalam tiga unsur: udara, air, dan tanah. Polusi ini berdampak langsung pada kesehatan rakyat dan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan tanpa visi ekologis juga menyulut krisis biodiversitas yang merupakan aset berharga kita.

Di sisi lain, krisis iklim yang merupakan fenomena global telah menimbulkan efek serius di Indonesia. Akibat naiknya permukaan laut, di pesisir utara Jawa terjadi penurunan muka tanah secara drastis. Di daerah seperti Pekalongan, Cirebon, dan Semarang dalam kisaran 0,3 hingga 11 sentimeter per tahun. Dampaknya adalah peningkatan risiko banjir rob yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 2022. Di Aceh Besar, tahun 2017 dan 2021 mencatat kegagalan panen yang konsisten akibat perubahan pola cuaca yang mengakibatkan banjir dan kekeringan secara bersamaan di berbagai lokasi. Sementara di wilayah Maluku terlihat perubahan pola penangkapan ikan tuna yang semakin jauh dari lokasi sebelumnya akibat perubahan suhu laut yang nyata. Semua ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia harus segera dimitigasi oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat.

> “Pembangunan tanpa visi ekologis menyulut krisis biodiversitas yang merupakan aset berharga kita.”

Indonesia Perlu Perubahan

Kualitas manusia yang belum memadai, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan krisis iklim adalah masalah utama dari daftar panjang masalah yang harus segera diselesaikan oleh negeri ini jika kita ingin mewujudkan "**Satu Indonesia Satu Kemakmuran**" sebelum usia 100 tahun terlewati.

Perubahan menjadi kata kunci. Kompleksitas dan skala masalah yang begitu besar membutuhkan paradigma, sistem tata kelola, dan pendekatan kebijakan yang baru dan berbeda dari apa yang ada sekarang. Dengan etos perubahan, kepemimpinan nasional harus mampu mengembalikan tujuan utama bernegara, yakni mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan berkeadilan.

Empat aspek perubahan harus menjadi fokus pergeseran paradigma: (1) dari persoalan penyelenggara pemerintahan menjadi persoalan rakyat, (2) dari cara pandang sektoral menjadi kawasan, (3) dari fokus pada pertumbuhan semata menjadi fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan, dan (4) dari pendekatan ego sentris menjadi pendekatan kolaborasi dan gotong royong.

Tentu saja perubahan bukan berarti menghilangkan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Bagaimanapun prinsip "*continuity and change*" (perubahan dan kelanjutan) adalah keniscayaan dan ini wajib menjadi nafas kepemimpinan ke depan. Pergantian pimpinan nasional hendaknya dijadikan ruang refleksi atas perjalanan bangsa ini setiap lima tahun. Dari refleksi ini kita perlu cara kerja baru yang inovatif dan berkelanjutan, bukan bersikap "*business as usual*", seolah-olah kita baik-baik saja.

Perubahan membutuhkan persatuan. Tidak ada perubahan tanpa dukungan dari seluruh unsur kebangsaan. Agenda perubahan adalah kerja kolektif di bawah kepemimpinan nasional yang mumpuni, berintegritas, dan kolaboratif. Melalui kolaborasi lintas sektor, lintas kelompok, lintas wilayah, dan lintas generasi, kita akan mampu bersama-sama sampai pada cita-cita Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan. Sebuah Negara Indonesia yang menghadirkan rasa aman dalam berdemokrasi, rasa setara dalam berekonomi, dan rasa adil dalam hukum. **Satu Indonesia Satu Kemakmuran** adalah potret masa keemasan Indonesia pada tahun 2045 yang harus kita bangun bersama, sebagai tanggung jawab sejarah kita untuk melengkapi **Satu Bangsa, Satu Negara, Satu NKRI,** dan **Satu Tanah Air** yang telah diwujudkan oleh generasi terdahulu.

EMPAT PERUBAHAN PARADIGMA

1. Persoalan Penyelenggara Pemerintahan → **PERSOALAN RAKYAT**
2. Cara Pandang Sektoral → **CARA PANDANG KAWASAN**
3. Fokus Pertumbuhan Semata → **FOKUS PERTUMBUHAN & KEBERLANJUTAN**
4. Pendekatan Egosentris → **PENDEKATAN KOLABORASI & GOTONG ROYONG**

SATU BANGSA
SATU NEGARA
SATU NKRI
SATU TANAH AIR
SATU KEMAKMURAN

Visi

Indonesia Adil Makmur untuk Semua

Untuk membangun visi suatu negara dan bangsa yang begitu besar dan begitu luas seperti Indonesia, kami, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, melakukan perjalanan panjang tanpa lelah dari Aceh hingga Papua. Kami bertemu, bertatap muka, mendengar, dan berbicara dengan rakyat Indonesia dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, profesi, status sosial ekonomi, dan agama. Kami juga berdiskusi dengan ribuan tokoh masyarakat, pemikir dan akademisi, pemuka agama dan aktivis. Perjalanan panjang tersebut memberi bukti bahwa kehidupan rakyat saat ini masih dipenuhi berbagai masalah. Dan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua, yang dibutuhkan adalah perubahan.

Perubahan tidak hanya suatu keinginan, tetapi juga suatu keniscayaan. Apa yang kami dengar dan kami tangkap dari rakyat semakin menguatkan tekad kami untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi negeri. Dengan perubahan sebagai dasar gagasan, kami mengusung visi yang merupakan impian jutaan rakyat Indonesia, yakni:

"Indonesia Adil Makmur untuk Semua"

Indonesia yang makmur menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai masa lalu. Kemakmuran ditandai oleh layanan publik yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi. Indonesia yang makmur dan ditopang oleh industri kompetitif yang menghasilkan produk kelas dunia. Indonesia yang makmur disegani bangsa-bangsa dunia karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer.

Kemakmuran Bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan. Karena alam Indonesia adalah warisan generasi masa lalu sekaligus pinjaman generasi masa depan yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Dalam Indonesia yang makmur, setiap warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana ekologis. Indonesia senantiasa menjaga hutan, air, sungai, gunung, laut, dan keragaman hayati agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan masa depan, dan berkontribusi kepada kesehatan Bumi.

Indonesia yang makmur adalah negara yang berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses ke layanan publik tanpa kecuali. Indonesia di mana kesempatan untuk hidup layak dan bahagia dapat dicapai oleh setiap anak bangsa apapun agamanya, jenis kelaminnya, sukunya, bahasanya, usianya, dan keadaan tubuhnya. Indonesia di mana setiap individu memiliki kebebasan berpendapat dan memiliki kesempatan setara untuk menjadi apa saja yang terbaik bagi mereka. Indonesia di mana setiap anak bangsa mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Indonesia di mana hak-hak asasi setiap warganya dilindungi oleh Negara sebagai tanggung jawab konstitusional.

Inilah visi kami yang akan kami wujudkan jika diberi amanah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Misi

8 Jalan Perubahan

Visi tersebut, akan diwujudkan dalam delapan Misi, yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Delapan misi tersebut kami sebut sebagai: "**8 JALAN PERUBAHAN**"

Delapan misi tersebut akan dijabarkan, dalam bentuk agenda dan program sebagai berikut:

MISI 1.

Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air

MISI 2.

Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global

MISI 3.

Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang

MISI 4.

Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan

MISI 5.

Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya

MISI 6.

Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa

MISI 7.

Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia

MISI 8.

Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat

MISI 1

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN POKOK DAN BIAYA HIDUP MURAH MELALUI KEMANDIRIAN PANGAN, KETAHANAN ENERGI, DAN KEDAULATAN AIR

Kebutuhan pokok adalah hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pangan, hunian, energi, dan air yang terjangkau adalah prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara harus mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air untuk memastikan bangsa Indonesia mampu melanjutkan perbaikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Khusus untuk pangan, harus didorong "kemandirian", guna memastikan Indonesia (sebagai bangsa agraris) bekerja keras memaksimalkan potensi sumber daya untuk memproduksi pangan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk pangan strategis, menekan risiko krisis pangan akibat dinamika global, dan sekaligus menyejahterakan para petani (mewakili sekitar 30% tenaga kerja) yang mayoritas belum sejahtera.

Agenda Misi 1

1. KEMANDIRIAN PANGAN

- Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian;

- Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan teknologi terkini termasuk alat pengering (*dryer*) serta membangun fasilitas gudang untuk menurunkan tingkat kehilangan, tingkat penyusutan, dan menjaga kualitas panen, serta mengatur suplai (terutama di saat musim panen dan musim kekurangan) untuk menjaga stabilitas harga;

- Melaksanakan "Revolusi Agromaritim" di mana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani, di antaranya melalui:

    - Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui *contract farming*;

    - Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen termasuk melalui optimalisasi resi gudang;

    - Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi.

- Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik;

- Mendorong diversifikasi bahan pangan berbasis produk lokal;

- Memperkuat riset dan inovasi bibit, benih dan pupuk, serta memfasilitasi penerapan hasil riset nasional, di lapangan;

- Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi;

- Menyediakan penyuluh pertanian di setiap desa untuk membantu petani mempraktikkan teknik pertanian terkini dan terbaik, melalui program "BAHU DESA" (Bantuan Hukum dan Usaha);

- Menyebarkan tenaga kerja produktif dan meningkatkan produksi pangan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi;

- Melaksanakan kebijakan afirmasi bagi petani untuk memperoleh akses terhadap lahan;

- Melaksanakan industrialisasi sektor pertanian, untuk menghasilkan produk bernilai tinggi;

- Melaksanakan transformasi kelembagaan, guna memperbaiki koordinasi sektor pangan antar Kementerian dan Lembaga (K/L), terutama antara beberapa fungsi di bawah

kementerian yang mengurusi perindustrian, perdagangan dan pertanian;

- **Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan kehutanan, dengan:**
  - Membangun tata niaga yang adil dan efisien;
  - Mendorong riset, inovasi, dan industrialisasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi;
  - Mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak, dan penyerapan produk;
  - Memfasilitasi para pekebun untuk melakukan peremajaan tanaman, terutama karet, kopi, cokelat dan sawit;
  - Memberi kemudahan sertifikasi peternakan bagi peternak;
  - Mengefektifkan peran penyuluh, untuk memastikan para petani bekerja dengan teknologi dan cara terbaik;
  - Memberikan kepastian terwujudnya ekosistem usaha yang saling menyejahterakan bagi koperasi dan korporasi; dan
  - Menerapkan *sustainable forest management*, dan menghentikan deforestasi hutan, terutama di Kalimantan, Sumatra dan Papua, untuk mempertahankan fungsi sebagai paru-paru dunia.
  - Memberikan kepastian pengawasan untuk membentuk pasar yang adil

2. KEMUDAHAN AKSES HUNIAN

- Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal;
- Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah;
- Menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.
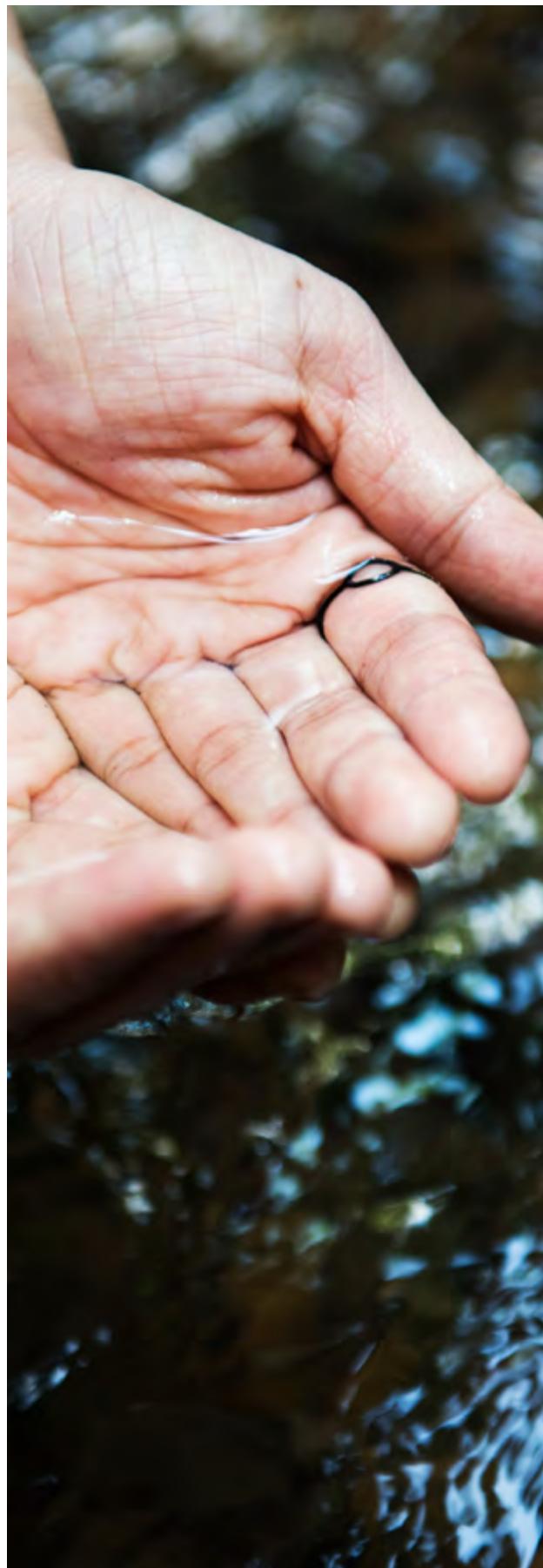
3. KETAHANAN ENERGI

- Membudayakan perilaku hemat energi, melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan, serta memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi;
- Mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri;
- Menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi murah;
- Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik;
- Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat;
- Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi, termasuk menerapkan *Enhanced Oil Recovery* di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia, yang sudah tua;
- Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela;
- Melaksanakan program "Indonesia Menuju EBT" melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi;
- Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi;
- Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT;
- Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk: *project development funding, viability gap financing,* dan *credit enhancement funding*;
- Memanfaatkan *green financing* dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang *carbon trading* dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri;
- Membentuk Dana Abadi (*Resource Endowment Fund*) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT;
- Mendorong penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan layanan dan keekonomian harga tiket, yang diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.

4. KEDAULATAN AIR

- Memperbaiki tata kelola sumber daya air dengan mengedepankan kedaulatan, keadilan atas air, dan keberlanjutan;
- Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau;
- Memastikan pemanfaatan air permukaan yang bijak untuk berbagai sektor termasuk industri dan sektor pertanian;
- Menjamin setiap rumah tangga di Indonesia, termasuk di Kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman, dapat menikmati air dengan kualitas yang baik dengan biaya terjangkau;
- Menjamin kelangsungan sumber daya air melalui penegakkan, pengendalian, dan pembangunan berdasarkan tata ruang yang mempertimbangkan konservasi sumber daya air;
- Memastikan konservasi cadangan air tanah melalui pengendalian eksploitasi air tanah secara masif, serta mendorong kota-kota menerapkan prinsip *sponge city*;
- Memastikan ketersediaan infrastruktur guna menjamin ketersediaan air bagi kegiatan sehari-hari masyarakat serta untuk pertanian dan perkebunan dengan sistem irigasi yang difasilitasi pemerintah;
- Mewujudkan keberlanjutan sektor air melalui penyediaan infrastruktur daur ulang air, pengolahan air limbah untuk biogas, dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengolahan air di tingkat keluarga.

MISI 2

MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN MEMPERLUAS KESEMPATAN BERUSAHA DAN MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, MEWUJUDKAN UPAH BERKEADILAN, MENJAMIN KEMAJUAN EKONOMI BERBASIS KEMANDIRIAN DAN PEMERATAAN, SERTA MENDUKUNG KORPORASI INDONESIA BERHASIL DI NEGERI SENDIRI DAN BERTUMBUH DI KANCAH GLOBAL

Negara perlu memastikan angkatan kerja mendapat pekerjaan, keluarga bisa menabung serta merencanakan masa depan. Negara berperan dalam menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan sistem perlindungan sosial. Sehingga kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Terkait hal ini diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang penuh terobosan. Selain itu dibutuhkan industrialisasi, pengembangan dan optimalisasi sektor maritim dan sumber daya alam. Misi ini juga mencakup pembaharuan BUMN agar berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan koperasi yang bertumbuh kembang sesuai amanat konstitusi, dan pengembangan UMKM yang selama ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja.

Agenda Misi 2

1. PENGENTASAN KEMISKINAN

- Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung ("memberi ikan") seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran;
- Meningkatkan program yang bersifat tidak langsung ("memberi kail") berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya;
- Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan multisektor dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% (Maret, 2023) menjadi 4,0%-5,0% (2029); dan kemiskinan ekstrem ~0% (2026);
- Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan papan, termasuk melalui program "JAS MERAH PUTIH", Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota;
- Memastikan akses dan keterjangkauan biaya layanan publik bagi masyarakat segmen ekonomi menengah dan bawah, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan;
- Memperbaiki akurasi data kemiskinan, digitalisasi *database* kemiskinan Indonesia serta digitalisasi sistem *monitoring* dan evaluasi program pengentasan kemiskinan;
- Membangun ekosistem *Food Bank* sebagai jembatan (redistribusi) antara pihak yang surplus makanan dengan yang membutuhkan makanan;
- Mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran, komprehensif, dan inklusif melalui perluasan kepesertaan khususnya bagi kelompok informal miskin, lansia, dan rentan tanpa menciptakan ketergantungan;
- Membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial yang merupakan payung bagi seluruh program perlindungan sosial yang dikelola oleh sebuah badan yang bekerja secara profesional untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas program.

2. PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS

- Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/ *green jobs* pada 2025-2029;
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% (Feb 2023) menjadi 3,5%-4,0% (2029);
- Melakukan pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi) tenaga kerja di masa mendatang serta menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan;

- Membentuk *Skill Development Fund* di bawah Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mempercepat pelatihan kerja dan mengembangkan profesi dan bisnis;
- Menaikkan batas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha;
- Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12% (Feb 2023) menjadi 50% (2029);
- Penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk dengan memberantas TKA ilegal;
- Mendorong dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk dengan pembatasan dan disinsentif penggunaan TKA yang berlebihan;
- Membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (*start-up*) dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya sektor industri kreatif;
- Memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda, untuk menekan tingkat pengangguran terbuka;
- Memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya untuk program tertentu.

3. PEMERATAAN EKONOMI

- Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja;
- Menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029);
- Mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi;
- Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan;
- Memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
- Memperkuat dan memeratakan literasi digital di kalangan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan digital secara konstruktif;
- Melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk meningkatkan kapasitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
- Melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.

4. KESETARAAN AKSES BAGI PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN UNTUK BERKARYA

- **Menjamin pemenuhan hak perempuan, dengan:**
  - Melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, melalui upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi korban melalui layanan krisis terintegrasi, layanan kesehatan dan psikologis gratis bagi korban tindak kekerasan, serta bantuan hukum melalui penguatan peran institusi yang ada;
  - Menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
  - Menjamin kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan potensinya di berbagai bidang.
- **Menyelenggarakan program "Indonesia Ramah Ibu dan Anak" melalui:**
  - Memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah;
  - Menghadirkan tempat penitipan anak yang terjangkau serta ketersediaan ruang laktasi di ruang publik; dan
  - Memberdayakan kaum ibu melalui aktivasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk memastikan tumbuh kembang anak, pendidikan karakter dan kegiatan lainnya.
- **Memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas, dengan:**
  - Memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur/fasilitas umum ramah terhadap disabilitas;
  - Memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi;
  - Memperluas manfaat bantuan sosial khusus;
  - Mendorong kesempatan setara untuk bekerja melalui kuota dengan kriteria penerimaan disesuaikan dengan kondisi objektif kelompok disabilitas;
  - Memfasilitasi kewirausahaan melalui akses pelatihan, pendampingan dan permodalan.
- **Memastikan penghormatan dan kesejahteraan veteran, purnawirawan polisi/TNI, pensiunan PNS, mantan atlet nasional serta lanjut usia (lansia), melalui:**
  - Memastikan kesejahteraan, perlindungan bagi veteran, purnawirawan, pensiunan, mantan atlet, dan lansia;
  - Memberikan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas layanan pemerintah, termasuk rumah layak, transportasi dan kesehatan;
  - Menghadirkan aktivitas sosial dan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan sosial lansia;
  - Meningkatkan kualitas lembaga perawatan masyarakat lansia berbasis komunitas bagi lansia;
  - Mendorong pengembangan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang inovatif.
- **Menjamin pemenuhan hak dasar anak yatim piatu dan terlantar, dengan:**
  - Memastikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya;
  - Memberikan bantuan dan perlindungan sosial;
  - Meningkatkan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial.

5. KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

- Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%-6,5% per tahun (2025-2029);
- Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029);
- Memastikan seluruh insentif pajak, termasuk *tax holiday* dan *tax allowance*, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal;
- Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023);
- Memperbaiki pengelolaan utang pemerintah untuk mengoptimalkan komposisi: jangka waktu, denominasi mata uang, dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara yang terencana, kompetitif, dan transparan guna memperoleh suku bunga terendah;
- Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi duplikasi program guna memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran;
- Mendorong konsep Penganggaran Multi-Tahun, di mana APBN disusun untuk setidaknya tiga tahun kedepan dalam kerangka *Medium Term Expenditure Framework* untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal. APBN tahun terdekat disetujui oleh DPR dengan lampiran APBN dua tahun berikutnya.

6. KEBIJAKAN MONETER YANG MENDUKUNG STABILITAS MAKROEKONOMI

- Mengendalikan inflasi melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan target inflasi rata-rata 2,0%-3,0% per-tahun (2025-2029);
- Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi;
- Menata lalu lintas devisa menuju ekonomi yang berdaya saing dan berdaya tahan terhadap guncangan global;
- Memastikan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan dan Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berdaya tahan;
- Mengantisipasi perkembangan geopolitik dan ekonomi global guna menjaga stabilitas ekonomi di masa depan;
- Menjaga dan mendorong independensi dan profesionalisme BI, LPS, dan OJK.

7. SEKTOR KEUANGAN YANG TANGGUH DAN EFISIEN

- Menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan;
- Mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kebijakan terkait perbankan dan lalu lintas devisa untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas perbankan nasional;
- Mewujudkan ekosistem yang kondusif, termasuk dengan menjamin kepastian hukum, menyiapkan insentif fiskal, dan mendorong inovasi regulasi bagi bertumbuhnya industri pasar modal, reksadana, asuransi, reasuransi, pembiayaan, penjaminan, dan dana pensiun, menuju industri keuangan yang inklusif, efisien dan andal;
- Meningkatkan fungsi intermediari perbankan, di antaranya dengan mendorong perbankan, khususnya bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional menuju suku bunga kredit yang kompetitif;
- Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses keuangan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan dan pemerataan kesejahteraan;
- Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan *online*, pinjaman *online*, judi *online*, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum;
- Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk meningkatkan kedalaman dan inklusivitas sektor keuangan.

8. KELEMBAGAAN KEUANGAN NEGARA

- Membangun kelembagaan yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi;
- Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara;
- Mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi dan sinergi;
- Memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi yang matang.

9. IKLIM INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

- Mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal: (1) mendapatkan izin usaha, (2) mengurus izin mendirikan bangunan, (3) memperoleh akses listrik, (4) mendaftarkan properti, (5) melakukan ekspor-impor, (6) membayar pajak, (7) perlindungan bagi investor, (8) mendapatkan kepastian atas kontrak, dan (9) memperoleh kredit;
- Memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan Pemerintah Daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia;
- Meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, dimana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan;
- Memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029);
- Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi;
- Mendorong pemerintahan digital (*e-government*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memfasilitasi kemudahan dalam berusaha.

10. HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI

- Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menuju 22,0%-23,0% (2029);
- Memberikan insentif bagi pengembangan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
- Mendorong investasi, baik oleh swasta dan BUMN, dalam sektor industri strategis berbasis teknologi tinggi, yang mencakup pertahanan, transportasi, biomedika, telekomunikasi, dan kelautan;
- Membangun kawasan industri khususnya di berbagai wilayah luar Jawa yang berbasis sumberdaya lokal dan terhubung dengan rantai pasok global;
- Meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui penguatan pendidikan vokasi bekerja sama dengan para pelaku industri.

11. INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN LOGISTIK

- Mengembangkan infrastruktur nasional yang terintegrasi melalui perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan efek ganda bagi ekonomi kawasan;
- Memperbaiki jaringan logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi dengan target peningkatan indeks kinerja logistik (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029);
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa, dengan lebih memprioritaskan pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar;
- Membangun sistem informasi logistik terintegrasi untuk memastikan tata kelola serta efisiensi proses perpindahan barang dan manusia lintas moda transportasi melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan kelembagaan;

- Menyediakan akses internet berkualitas dan terjangkau untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan UMKM.

12. EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN

- Melaksanakan "Revolusi Agromaritim" dimana untuk produk laut tertentu nelayan tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga hasil laut yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan antara lain melalui:
    - Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi laut dan harkat kehidupan nelayan
    - Meningkatkan kemudahan mengurus izin melaut bagi nelayan;
    - Meninjau ulang perhitungan dan implementasi pungutan hasil tangkap yang adil bagi nelayan.
- Mewujudkan kepastian untuk mendapatkan subsidi BBM dan bantuan peralatan melaut termasuk alat penangkapan ikan bagi nelayan;
- Memanfaatkan posisi strategis Indonesia diantara dua samudra dan dua pusat ekonomi dunia, dengan mengembangkan pusat perdagangan di Selat Malaka dan industri pendukungnya, meliputi: simpul *(hub)* maritim, pelabuhan kontainer, industri dan jasa berbasis maritim, pasar komoditas, pusat perdagangan, manufaktur, dan properti;
- Mereformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu untuk mewujudkan keunggulan "ekonomi biru" yang ditopang oleh keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, termasuk penjagaan perairan dari penyusup asing;
- Mengembangkan sistem transportasi dan pelabuhan laut yang terkoneksi dengan hub maritim global dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan infrastruktur darat untuk menumbuhkan industri di kawasan Tengah dan Timur Indonesia;
- Mendorong kerja sama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia, meliputi: biologis, geofisis, geologis dan klimatologis; serta meningkatkan nilai tambah sektoral dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kepulauan Indonesia;
- Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis aneka hasil laut baik diproduksi secara budidaya maupun tangkapan dengan pendekatan teknologi dan industri untuk konsumsi domestik maupun ekspor;
- Menghilangkan praktik penangkapan hasil laut *ilegal*, *unregulated,* dan *unreported* (IUU);
- Membantu para nelayan dan pembudidaya untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan terjangkau, termasuk perahu, alat tangkap ikan, depo bahan bakar, fasilitas pelabuhan ikan, teknologi budidaya, *cold storage*, pabrik es, fasilitas pengawetan, pembiayaan, permodalan, serta perlindungan keselamatan kerja nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK);
- Membangun Pasar Ikan Rakyat (PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan;
- Memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan.

13. SUMBER DAYA ALAM (SDA) BERKELANJUTAN

- Mewujudkan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan bagi daerah, termasuk dengan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan;

- Memperbaiki manajemen eksternalitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekitar dan memastikan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang;

- Meningkatkan praktik Environmental, Social, Governance (ESG) dalam pengelolaan SDA;

- Mendorong hilirisasi mineral dan batubara yang berkelanjutan dalam kerangka strategi industrialisasi guna menciptakan produk unggulan bernilai tinggi;

- Memprioritaskan penciptaan lapangan kerja terampil bagi masyarakat lokal di sektor SDA;

- Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan sarana sekolah, rumah sakit, balai latihan kerja, dan UMKM bagi warga lokal;

- Membentuk Dana Abadi SDA (*Resource Endowment Fund*) untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi menipis dan habisnya cadangan SDA.

14. PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI KREATIF

- Menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor ekonomi dan sumber penerimaan negara;

- Menjadikan turisme sebagai bagian integral dari strategi merawat budaya dan menjaga lingkungan hidup;

- Mengoptimalkan kolaborasi antara budaya, turisme dan industri kreatif untuk menciptakan produk dan *brand* yang mendunia dan berciri Indonesia;

- Melakukan diversifikasi tujuan dan jenis wisata serta mengembangkan turisme berbasis pelaku usaha komunitas lokal;

- Menduniakan pariwisata Indonesia melalui promosi pariwisata terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, BUMN, masyarakat sipil, dan swasta;

- Memperkuat kualitas manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan formal dan non-formal serta budaya magang;

- Menciptakan ekosistem industri kreatif berkeadilan dengan kebijakan afirmatif untuk pembelian/penggunaan *brand* buatan Indonesia dan merealisasikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan;

- Menciptakan simpul kreativitas (*creative hub)* di perkotaan yang menghubungkan pekerja, investor, dan inventor kreatif;

- Membangun pusat kebudayaan dan pusat sinema kelas dunia di berbagai kota di Indonesia;

- Membangkitkan budaya sinema dengan memajukan pendidikan formal perfilman serta mendorong tumbuhnya sinema menuju rasio satu layar untuk setiap 100.000 populasi;

- Menegakkan aturan royalti dan *performing right* yang ideal bagi penyanyi, komposer musik, kreator, dan produk ekonomi kreatif lainnya, termasuk menginisiasi perlindungan hak cipta bagi konten kreator di media sosial;

- Meningkatkan hambatan impor non-tariff dan pengawasan persaingan usaha dalam mencegah meningkatnya impor barang produk kreatif (termasuk fashion, hijab, dan batik) melalui *platform* digital dan praktik harga predator.

15. EKONOMI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- Menata ulang kelembagaan riset dan inovasi agar lebih produktif dan kompetitif;

- Membangun pusat desain industri (industrial design center) di bawah Kementerian Perindustrian yang langsung melayani kebutuhan riset, desain, dan rekayasa produk bagi industri manufaktur dengan prioritas produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekaligus menaikkan daya saing Indonesia di pasar global;

- Meningkatkan belanja R&D dari 0,24% (2021) menuju 0,4%-0,6% PDB (2029) dengan mendorong kontribusi swasta yang lebih besar;

- Memberi insentif seluruh pemangku kepentingan di bidang riset dan memfasilitasi proses komersialisasi hasil inovasi melalui penyederhanaan dan fasilitasi proses paten penguatan hak cipta;

- Menyediakan infrastruktur pendorong munculnya kewirausahaan berbasis teknologi di kampus-kampus meliputi aspek regulasi, kepakaran, jaringan teknologi informasi, pasar, dan pendanaan;

- Mengoptimalkan peran BUMN dalam mengimplemetasikan hasil riset nasional;
- Mendorong pendirian laboratorium riset kelas dunia bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan universitas terkemuka dalam mengembangkan ilmu dan inovasi yang kompetitif, khususnya dalam bidang biomedika, farmasi, kelautan, pertahanan, energi, dan pangan.

16. REPOSISI PERAN BUMN

- Menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia;
- Menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan;
- Mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama, dimana:
  - Proyek yang layak secara finansial: BUMN dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis murni;
  - Proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial: BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah;
  - Proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada: Pemerintah bertanggung jawab penuh yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan penugasan kepada BUMN dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah.
- Mereview seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas;
- Mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya;
- Menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak manapun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

17. KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

- Mewujudkan koperasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- Mengoptimalkan peran koperasi melalui: (1) merevitalisasi BUMDes yang layak untuk dijadikan Koperasi, (2) merevitalisasi koperasi-koperasi pondok pesantren, dan (3) membentuk badan-badan usaha milik rakyat, termasuk BUM-Petani, dan BUM-Nelayan;
- Mempermudah pendirian dan administrasi koperasi dan UMKM, melalui penyederhanaan regulasi dan penerapan teknologi informasi;
- Memperluas akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN dan korporasi melalui berbagai program kemitraan;
- Meningkatkan relevansi koperasi dan UMKM dengan mendorong pemanfaatan *e-commerce* dan teknologi informasi;
- Memberikan dukungan peningkatan teknik produksi, manajemen, dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;
- Memfasilitasi akses pendanaan yang mudah dan murah dengan memperluas dan memperbaiki program pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk melalui KUR;
- Memperkuat kelembagaan, peraturan, dan pengawasan untuk menghindarkan koperasi dijadikan kendaraan bagi kejahatan keuangan, termasuk investasi bodong dan pencucian uang;
- Meningkatkan pembelian produk UMKM dalam negeri melalui pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD.

18. EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- Memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendorong terwujudnya rantai pasok ekonomi halal;
- Menerapkan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) secara adil, transparan, dan efisien;
- Menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia;
- Memastikan terwujudnya keadilan keuangan dalam pengembangan perbankan syariah dengan menaikkan alokasi pendanaan untuk menggerakan UMKM;
- Memastikan regulasi ekonomi syariah secara mandiri tetapi bersinergi dengan regulasi ekonomi konvensional;
- Mendorong pengumpulan zakat melalui lembaga yang dikelola secara transparan dan profesional untuk mendukung berbagai program sosial;
- Menjadikan bank syariah sebagai *nazhir wakaf* uang untuk memperkuat peran perbankan syariah sebagai institusi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi;
- Memperkokoh posisi perbankan syariah dalam memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat secara inklusif, dengan mendorong masuknya fungsi sosial sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank.

DESA
MASA DEPAN
INDONESIA

MISI 3

MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS BERKELANJUTAN UNTUK GENERASI MENDATANG

Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Inisiatif kami meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pengendalian polusi, antisipasi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati. Kita harus pastikan lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang lebih baik daripada kondisi yang kita terima dari para pendahulu.

Agenda Misi 3

1. PENGUATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP

- Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, termasuk keadilan antar generasi;
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya;
- Perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup perlu didukung kelembagaan yang kuat serta dapat memenuhi hak akses atas informasi dan partisipasi masyarakat serta tata kelola kolaboratif;
- Memperkuat penegakkan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab pemulihan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas aparat penegakan hukum.

2. PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

- Meningkatkan peran EBT dalam bauran energi nasional untuk menahan laju perubahan iklim dan polusi, menghemat devisa, dan melepaskan diri dari ketergantungan impor energi;
- Merancang skema insentif dan prioritisasi EBT bersumber dari panas bumi, tenaga air, energi laut, surya, bayu, dan biomassa dalam rangka memenuhi komitmen *Net Zero Emission* 2060;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih baik secara *on grid* maupun *off grid* melalui skema insentif yang menarik;
- Memastikan nol emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan secara bertahap disertai dengan terwujudnya elektrifikasi pada berbagai sektor, terutama industri dan transportasi;
- Membatasi pembangunan baru dan memensiundinikan pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diprioritaskan dari Jawa dan Bali, diikuti wilayah-wilayah lainnya pada waktunya;
- Memberikan insentif bagi pengembangan EBT dan disinsentif untuk energi tidak terbarukan;
- Menuju kendaraan umum listrik diikuti dengan skema penukaran kendaraan konvensional, disinsentif penggunaan kendaraan tua dan tinggi emisi, serta penyediaan infrastruktur pengisian *battery*.

3. EKONOMI HIJAU

- Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menyukseskan target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 dan mendukung *champion projects* berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050;

- Menetapkan indeks ekonomi hijau sebagai indikator yang relevan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan;
- Mewujudkan keberpihakan pada ekonomi hijau dengan mendorong pengintegrasian indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan dan dijadikan basis evaluasi risiko di sektor keuangan;
- Mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak;
- Memberikan insentif pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi sektor hijau untuk peningkatan penciptaan pekerjaan hijau/*green jobs* dengan kesempatan setara bagi tiap lapisan masyarakat;
- Memberikan insentif kepada pelaku ekonomi untuk mendorong produksi dan pembelian barang dan jasa rendah emisi, serta untuk mendorong investasi hijau;
- Mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip "9R" yaitu *Refuse, Rethink, Reduce* untuk tahap desain produk; *Reuse, Repair, Refurbish* untuk tahap distribusi dan konsumsi; serta *Remanufacture, Repurpose, Recycle* untuk tahap produksi;
- Mengimplementasikan nilai ekonomi karbon melalui penerapan pajak karbon, penerapan sistem perdagangan karbon yang inklusif dengan standar dan kriteria yang jelas, serta instrumen lainnya memastikan penurunan bersih emisi gas rumah kaca.

4. ADAPTASI DAN MITIGASI DAMPAK KRISIS IKLIM

- Memprioritaskan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan komitmen Indonesia dalam ikut mengerem laju pemanasan global;
- Menekan laju kerusakan hutan, konservasi *intake forest*, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai *carbon sink*;
- Mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat;
- Meningkatkan upaya untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir, termasuk hutan *mangrove* dan terumbu karang untuk memaksimalkan potensi *blue carbon* dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir;
- Menetapkan batas atas emisi gas rumah kaca dari tiap sektor dan tujuan, kemudian mengintegrasikan target-target penurunannya ke dalam perencanaan dan program setiap kementerian dan lembaga pemerintah terkait, serta aktor non-pemerintah;
- Membangun kapasitas masyarakat rentan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, seperti petani dan masyarakat pesisir.

5. POLUSI UDARA, AIR DAN SAMPAH

- Mendorong solusi holistik terhadap pengurangan polusi udara melalui percepatan transisi EBT, penerapan teknologi pengendalian emisi yang lebih baik di PLTU, penyediaan transportasi publik, dan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik;
- Membangun lebih banyak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan meningkatkan pengawasan, serta penegakan hukum untuk mengurangi pencemaran air dari domestik, fasilitas kesehatan, industri, tambang, dan sumber lainnya;
- Memperketat dan menerapkan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat serta teknologi pengendalian beban pencemar terbaik;

- Menjadikan Indonesia sebagai salah satu contoh sukses ekonomi yang mengoptimalkan daur ulang di dunia;

- Memastikan tersedianya infrastruktur persampahan yang memenuhi standar dari hulu hingga hilir, serta memperbanyak infrastruktur yang mendukung ekonomi sirkular;

- Menyiapkan regulasi untuk produk rendah karbon dan menjadikan pemerintah sebagai konsumen utama produk rendah karbon dalam kegiatan pembangunan;

- Menjadikan Indonesia sebagai zona larangan impor sampah B3 dan mendorong Indonesia menjadi wilayah bebas kantong plastik.

6. HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

- Menguatkan perbaikan tata kelola kehutanan dengan mempercepat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk pemulihan ekosistem dan kesejahteraan;

- Merestorasi alam Indonesia untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, khususnya ekosistem yang paling berpotensi menangkap dan menyimpan karbon serta mencegah dan mengurangi dampak bencana alam;

- Membangun jaringan kawasan konservasi yang lebih luas di Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan masyarakat lokal;

- Melindungi, merestorasi, mereboisasi, mengelola, dan mempromosikan ekosistem melalui peningkatan pendanaan dan komitmen terhadap hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, dan zona proteksi flora dan fauna lainnya;

- Meningkatkan perlindungan terhadap satwa langka dan terancam punah melalui penguatan regulasi perlindungan satwa langka dari eksploitasi dan perburuan liar;

- Mendorong pemanfaatan lahan berbasis lingkungan melalui perbaikan regulasi lahan agar mengakomodasi unsur-unsur keberlanjutan dan keseimbangan;

- Mengarusutamakan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada diversifikasi pangan dan diversifikasi pola tanam;

- Menanamkan kesadaran atas pentingnya keanekaragaman hayati melalui edukasi lintas generasi dan lintas sektor dengan berorientasi keberlanjutan;

- Melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pemenuhan hak dan kewajiban komunitas lokal dalam manajemen perhutanan, selaras dengan prinsip *social forestry* dan untuk mencapai *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *net zero* 2030;

- Mendorong ketertelusuran rantai pasok (*supply chain traceability*) untuk produk pangan, pertanian dan juga produk lainnya, termasuk untuk mendapatkan sertifikasi *fair trade*.

7. KETAHANAN TERHADAP BENCANA ALAM

- Meningkatkan kapasitas Lembaga ketahanan bencana di pusat dan daerah melalui mekanisme koordinasi tanggap darurat, distribusi informasi, dan komunikasi risiko bencana;
- Membangun sistem peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya terhadap risiko tsunami, gunung berapi, banjir, dan gempa bumi;
- Melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat dan kesadaran bencana di daerah rawan bencana melalui edukasi di sekolah-sekolah dan organisasi sosial, disesuaikan dengan konteks lokal;
- Memastikan ketersediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang terintegrasi dengan kapasitas tanggap darurat serta terencana di daerah;
- Melakukan digitalisasi dan modernisasi mitigasi bencana dengan mendorong interkoneksi dan integrasi informasi kebencanaan yang dapat diakses secara mudah dan cepat.

8. KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN LINGKUNGAN

- Melakukan pengukuran dan *stocktaking* terjadwal untuk melengkapi data keanekaragaman hayati di Indonesia;
- Menghadirkan keadilan iklim di Indonesia dengan memastikan harmonisasi nilai ekonomi dan ekologi di setiap sektor sekaligus memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan;
- Meningkatkan pelibatan aktor-aktor non-pemerintah dalam berpartisipasi menjaga lingkungan;
- Menjaga kepastian hukum dan keberpihakan pemerintah dalam kaitannya dengan lingkungan, serta melibatkan generasi muda dalam menanamkan visi lingkungan lintas generasi;
- Mengembangkan instrumen ekonomi karbon berstandar internasional dan praktik terbaik dalam mendorong inovasi kegiatan berbasis lingkungan dan mengembangkan potensi nilai ekonomi karbon pada tingkat internasional;
- Mengambil peran sentral dalam diplomasi iklim dengan menerapkan nilai keadilan iklim, serta memaksimalkan pembiayaan internasional untuk pembiayaan krisis iklim.

MISI 4

MISI 4: MEMBANGUN KOTA DAN DESA BERBASIS KAWASAN YANG MANUSIAWI, BERKEADILAN DAN SALING MEMAJUKAN

Kota dan desa adalah bagian dari identitas masyarakat yang saling terkait dan tergantung. Namun, kondisi layak, nyaman, dan aman belum dirasakan di banyak tempat. Air masih susah dicari, hunian tidak layak, sanitasi tidak memadai, pilihan mobilitas amat terbatas, listrik tidak selalu menyala, wilayah tidak tertata, dan ekonomi tidak merata. Pembangunan kota dan desa masih timpang dan eksploitatif. Negara harus hadir untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan ini secara adil. Kota, desa, dan pengembangan kawasan, termasuk pesisir, kepulauan, dan pedalaman harus menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Agenda Misi 4

1. KOTA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING

- Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk generasi z, milenial, dan pekerja informal, melalui skema pembelian yang mudah dan murah;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan yang manusiawi, kompak, berorientasi transit dan berketahanan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan, dan pembentukan institusi pendukung di tingkat pusat;
- Mewujudkan kota layak huni dengan pemenuhan infrastruktur dasar, sosial, dan ekologis, di antaranya: jaringan transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau;
- Mengakselerasi pengembangan sistem transportasi umum massal di kota-kota strategis yang terdiri dari angkutan umum berbasis rel dan jalan sebagai moda utama yang terintegrasi dengan sistem mobilitas aktif serta kendaraan bebas emisi, sehingga mampu menjangkau seluruh kawasan kota secara efisien dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kesejahteraan dan menjaga nilai sosial budaya masyarakat kampung kota melalui penataan kampung, serta menghadirkan hunian layak berbasis komunitas;
- Menjadikan kota sebagai inkubator kreativitas, ruang ekspresi, dan produsen karya seni/budaya dan olahraga, dengan mendorong tumbuh kembang industri kreatif, pusat-pusat kebudayaan dan seni, mengembangkan fasilitas olahraga, dan menghadirkan kegiatan yang mendorong kohesivitas warga;
- Mengembangkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat dan lestari dengan mengurangi emisi karbon dan sampah, serta meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan ruang hijau, keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan EBT;
- Merealisasikan potensi wisata perkotaan melalui pengembangan fasilitas, layanan, kegiatan, branding dan aspek lainnya yang menjadi daya tarik bagi wistawan domestik dan global;
- Memperkuat kinerja birokrasi melalui meritokrasi dan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

2. DESA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

- Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi pengembangan desa, termasuk melalui peningkatan secara signifikan alokasi Dana Desa yang

pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan desa, dikelola oleh desa, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan kemandirian pangan nasional;

- Meningkatkan kualitas aparatur desa dalam mengelola Dana Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;

- Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa melalui pemberian akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, termasuk beasiswa pendidikan lanjut;

- Mengoptimalkan BAHU DESA untuk: (1) pendampingan hukum kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, dan (2) pendampingan usaha BUMDes;

- Menjamin peran aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan lewat penguatan kelembagaan dan pelibatan komunitas desa;

- Mengarusutamakan pembangunan desa berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur desa yang memadai, mencakup air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, jaringan irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, jaringan internet dan transportasi;

- Membangun desa-desa wisata didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk mempermudah akses dari dan menuju tujuan wisata;

- Mengembangkan ekonomi desa dengan mendorong sektor berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi desa, seperti desa pertanian terpadu, desa peternakan terpadu, desa industri, dan desa wisata, serta membuka peluang usaha baru melalui penguatan Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga perekonomian desa lain;

- Merevitalisasi BUMDes menjadi: (1) unit ekonomi yang aktif dan menyejahterakan masyarakat desa melalui pendampingan usaha, (2) sebagai sentra produksi pupuk organik, (3) lembaga keuangan mikro, dan (4) pengelola program “Satu Desa Satu Produk Unggulan” melalui program BAHU DESA;

- Memperkuat akses warga desa terhadap sumber daya alam serta mendorong pemanfaatannya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui pemberian kepastian hak atas tanah serta skema kemitraan yang berkeadilan;

- Memperkuat peran tenaga pendamping desa yang profesional dan memahami kebutuhan desa, di seluruh tingkatan;
- Mendorong munculnya desa-desa industri, dengan antara lain menggalakkan hilirisasi industri, membangun industri berorientasi ekspor dan melakukan digitalisasi desa;
- Meningkatkan peran putra-putri daerah sebagai aktor pembangunan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja untuk memajukan kualitas manusia desa, serta akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- Mendorong pelestarian adat, seni, dan budaya masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga adat, penyediaan wadah ekspresi yang inklusif, serta pemberdayaan komunitas.

3. REFORMA AGRARIA

- Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah;
- Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan;
- Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan;
- Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu;

- Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan;

- Menuntaskan program "Kebijakan Satu Peta" dan "Kebijakan Satu Data" serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari;

- Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, untuk mendongkrak ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan partisipatif;

- Mengembangkan rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia;

- Menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah.

4. PEMBANGUNAN REGIONAL DAN METROPOLITAN
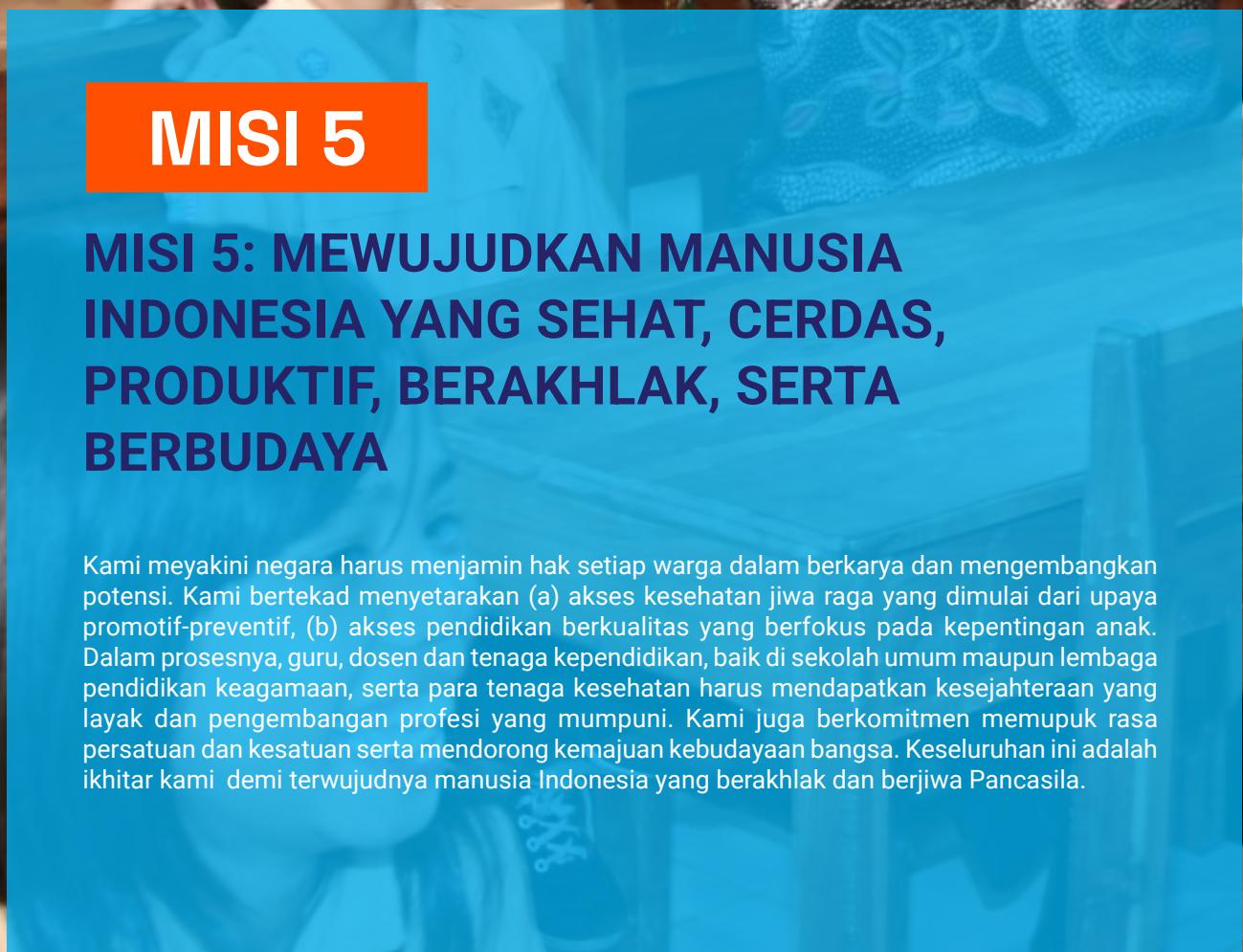
- Mempercepat pertumbuhan kawasan metropolitan dan regional melalui tata ruang yang terintegrasi dan kelembagaan antar daerah yang berkeadilan dan saling memajukan, serta dukungan fiskal dan non-fiskal dari Pemerintah Pusat;

- Mengintegrasikan dan meningkatkan ekonomi regional dengan mewujudkan integrasi sistem angkutan umum dan logistik yang memperlancar pertukaran barang dan jasa antar kawasan;

- Menjadikan kawasan inti metropolitan dan regional sebagai pusat pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, serta perdagangan bagi masyarakat daerah di sekitarnya;

- Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kawasan metropolitan yang terpadu, berbasis ilmu pengetahuan terkini, dan partisipatif.

5. PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR, KEPULAUAN, DAN PEDALAMAN

- Membangun kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia;
- Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus dengan mengutamakan sumber EBT dan berbasis potensi lokal;
- Membangun sistem transportasi dan logistik yang memadai untuk meningkatkan koneksi kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pusat-pusat ekonomi;
- Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga murah dan stabil melalui pembangunan sentra distribusi bahan pokok yang mudah dijangkau;
- Memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal, yang memungkinkan masyarakat kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman terhubung secara mudah dengan masyarakat umum lainnya;
- Memperkuat kapasitas masyarakat pesisir terhadap adaptasi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis lainnya.

MISI 5

MISI 5: MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, BERAKHLAK, SERTA BERBUDAYA

Kami meyakini negara harus menjamin hak setiap warga dalam berkarya dan mengembangkan potensi. Kami bertekad menyetarakan (a) akses kesehatan jiwa raga yang dimulai dari upaya promotif-preventif, (b) akses pendidikan berkualitas yang berfokus pada kepentingan anak. Dalam prosesnya, guru, dosen dan tenaga kependidikan, baik di sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan, serta para tenaga kesehatan harus mendapatkan kesejahteraan yang layak dan pengembangan profesi yang mumpuni. Kami juga berkomitmen memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta mendorong kemajuan kebudayaan bangsa. Keseluruhan ini adalah ikhitar kami demi terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak dan berjiwa Pancasila.

Agenda Misi 5

1. LAYANAN KESEHATAN TANPA DISKRIMINASI YANG ANDAL DAN EFISIEN

- Mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi Puskesmas didukung penguatan peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesehatan primer;
- Menambah Puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan;
- Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di seluruh Indonesia;
- Mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan berkualitas;
- Meningkatkan peran Posyandu dan kader kesehatan untuk kesehatan promotif dan preventif dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader;
- Membangun satu Rumah Sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang.

2. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG ANDAL

- Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- Mewujudkan sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN yang lebih mudah dan berorientasi keselamatan pasien;
- Memperkuat pelayanan jaminan kesehatan nasional dengan evaluasi besaran pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut (INA CBGs) sesuai ketentuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Mengefisienkan rujukan dengan dukungan teknologi informasi untuk mempersingkat alur rujukan dan mempermudah pengambilan obat.

3. AKSES PENDIDIKAN BERKEADILAN

- Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta;
- Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1+12 tahun dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;

- Memfasilitasi program Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, dan *homeschooling* untuk memperluas akses pendidikan bagi semua;
- Memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus;
- Menekan angka anak putus sekolah dengan menyediakan bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan dan menangani faktor-faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya putus sekolah;
- Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan di antaranya untuk memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk WC, air bersih, sanitasi dan higiene (WASH).

4. KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU BESERTA TENAGA KEPENDIDIKAN

- Meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja;
- Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah melalui berbagai pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- Mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan;
- Mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi;
- Memberikan kepastian jenjang dan jalur karier bagi profesi guru yang transparan, berbasis meritokrasi, dan sesuai minat;
- Memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus.

5. INSTITUSI PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA

- Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun swasta;
- Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Madrasah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan berbasis agama, sehingga memenuhi standar kompetensi nasional;
- Memberikan kepastian bagi lulusan agar diakui di antaranya untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, dan menggali potensinya;
- Membina santri dan lulusan lembaga pendidikan keagamaan khusus seperti Ma'had Ali yang menghasilkan ahli ilmu agama Islam dan juga lembaga sejenis di agama lain untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama di masyarakat sekaligus memperkuat kesalehan sosial dan pemahaman agama yang moderat.

6. KETERJANGKAUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

- Memastikan setiap Perguruan Tinggi Negeri menerapkan biaya operasional yang transparan dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi;
- Menghadirkan kesempatan beasiswa yang setara bagi anak yang memiliki potensi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;
- Memberikan kemudahan akses untuk persiapan proses penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;
- Memeratakan layanan pendidikan tinggi berkualitas melalui pengayaan program studi yang sudah ada atau pembukaan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

7. KESEHATAN IBU, BAYI DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

- Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas termasuk aktivasi bidan dan kader kesehatan;
- Menurunkan prevalensi stunting dari 21.6% (2022) menuju 11,0%-12,5% (2029) melalui pendampingan ibu hamil hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kolaborasi lintas sektor serta penguatan dukungan bagi kader desa/kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan seimbang, pencegahan infeksi dan perbaikan lingkungan;
- Memenuhi gizi seimbang dan terjangkau, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-8 tahun, serta bantuan untuk kelompok rentan;
- Menghadirkan tempat penitipan anak berbasis komunitas;
- Mentransformasi kelembagaan urusan keluarga, perempuan dan anak, untuk menjawab kebutuhan prioritas kesehatan ibu dan anak.

8. KESEHATAN MENTAL RAKYAT

- Mendorong edukasi tentang pentingnya kesehatan mental untuk menghapus stigma negatif, dimulai dari keluarga dan sekolah melalui aktivasi kelompok dukungan sebaya (*peer support group*) dan penguatan peran konselor di sekolah dan perguruan tinggi;
- Menjaga kesehatan mental masyarakat di antaranya melalui penambahan ruang publik dan fasilitasi berbagai kegiatan masyarakat sebagai tempat mengekspresikan diri dan potensinya;
- Mendorong hadirnya konselor kesehatan mental (psikolog) di Puskesmas dan menyediakan layanan konseling daring gratis berkolaborasi dengan lembaga dan komunitas yang ada;
- Menyediakan layanan pusat krisis *hotline* 24 jam di tiap kabupaten/kota yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit dan rumah aman, berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas yang ada;
- Memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan jiwa di setiap provinsi melalui peningkatan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit.

9. TATA KELOLA TENAGA KESEHATAN

- Memastikan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan, terutama Puskesmas, termasuk di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus;
- Memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- Memperbanyak beasiswa afirmasi untuk calon tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama calon dokter umum/gigi dan calon dokter spesialis dari keluarga prasejahtera dan/atau di daerah yang kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- Mendorong penataan tenaga kesehatan, termasuk mengubah status Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari mahasiswa menjadi tenaga kesehatan dalam pelatihan sehingga mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional;
- Memperluas akses bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan memperbanyak pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan (S2/S3) baik di dalam dan luar negeri;
- Meringankan beban administratif tenaga kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi.

10. PENDIDIKAN VOKASI DAN LULUSAN BERDAYA SAING

- Mendirikan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan vokasi untuk memastikan partisipasi dunia industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang adaptif dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi wilayah;

- Memfasilitasi kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan dunia industri dan dunia kerja serta merevitalisasi peran Balai Besar Vokasi sebagai sistem pendukung;

- Mendorong dunia industri dan dunia kerja untuk hadir mengajar di SMK/PTV dan memastikan para guru/dosen memperoleh pengakuan dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;

- Mendorong serapan lulusan SMK/PTV oleh dunia industri dan dunia kerja berbasis insentif;

- Memberikan insentif bagi setiap dunia industri dan dunia kerja yang berinvestasi pada SMK/PTV, serta untuk memfasilitasi guru/dosen memperoleh pengalaman industri.

11. PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU DAN RELEVAN

- Memprioritaskan alokasi dana riset pada perguruan tinggi agar efektif dan berdayaguna;

- Mengembangkan skema dana riset kompetitif bagi para dosen di perguruan tinggi;

- Mentransformasi tata kelola perguruan tinggi agar berdaya saing dan berdampak bagi dunia akademis, riset dan masyarakat;

- Memfasilitasi kegiatan dan kerja sama akademik di kancah internasional untuk meningkatkan kolaborasi dan persepsi dunia terhadap Perguruan Tinggi Nasional;

- Memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta dalam mengembangkan riset dan inovasi yang berkualitas dan implementatif.

12. EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG BERPUSAT KEPADA ANAK

- Memperkuat pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah kurikulum;
- Mendukung komunitas dan organisasi pegiat pendidikan yang berkontribusi dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan;
- Mendorong anak mencintai ilmu dan sains melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan menarik;
- Memfasilitasi perbaikan kualitas sekolah/ Perguruan Tinggi swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan;
- Menghadirkan ruang literasi berkualitas melalui revitalisasi perpustakaan daerah dan memastikan sekolah memiliki perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas;
- Menanamkan sikap anti narkoba melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif.

13. POLA HIDUP DAN LINGKUNGAN SEHAT

- Mengaktifkan gerakan masyarakat hidup sehat;
- Menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana publik yang mendukung aktivitas fisik masyarakat, termasuk taman, trotoar, jalur sepeda, dan sarana prasarana olahraga;
- Memfasilitasi pembangunan satu wahana/ lapangan olahraga di setiap desa dan satu kawasan pengembangan olahraga di setiap kabupaten/kota;
- Melaksanakan festival olahraga sepanjang tahun dan kompetisi berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional, baik pemula maupun profesional;
- Menata produk dengan kadar gula, garam dan lemak berlebih untuk menekan angka obesitas dan penyakit degeneratif, di antaranya melalui kewajiban pelabelan yang jelas terkait kandungan gula, garam dan lemak, serta risikonya;
- Program KPR bersubsidi khusus bagi anak muda dan pekerja informal yang belum memiliki hunian layak, dengan lingkungan hidup yang sehat dan lestari dengan mengurangi sampah, emisi, dan polutan, serta memaksimalkan daya dukung lingkungan.

14. KESIAPAN DAN DAYA TAHAN TERHADAP PANDEMI

- Mempercepat penghapusan penyakit menular terutama tuberkulosis dan malaria;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman pandemi berikutnya;
- Meningkatkan sistem pengawasan nasional dengan integrasi data dan sistem informasi fasilitas kesehatan dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat;
- Memperkuat RS tingkat provinsi dalam menangani penyakit menular/infeksi dan kesiapan nasional akan potensi ancaman pandemi berikutnya.

15. RAKYAT YANG MENGHARGAI PERBEDAAN DAN AKTIF MERAWAT PERSATUAN

- Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak dan generasi muda melalui cara-cara yang tepat dan menyenangkan;
- Menjadikan sekolah, desa dan kota sebagai ruang tumbuh kembang persenyawaan atas keberagaman;
- Menjamin ruang publik sebagai ruang inklusif yang terbuka lebar untuk ekspresi keberagaman termasuk perayaan hari besar keagamaan;
- Menguatkan kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam mempromosikan persatuan atas keberagaman;
- Menerapkan budaya organisasi yang inklusif dimulai dari sektor pemerintahan sebagai teladan bagi sektor-sektor lainnya;
- Menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dan/atau kepercayaan dalam menjalankan aktivitas peribadatan dan merayakan hari besar keagamaan termasuk mempermudah dan memfasilitasi izin pendirian tempat ibadah;
- Menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dan/atau kepercayaan dalam menjalankan aktivitas peribadatan termasuk dalam pendirian rumah ibadah;
- Memperkuat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan dukungan anggaran terhadap program-program penguatan kerukunan beragama;
- Menghadirkan program dukungan bantuan untuk tempat ibadah.

16. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN YANG TERJANGKAU

- Memperkuat riset pengembangan obat (termasuk herbal dan tradisional), vaksin dan bahan medis dalam negeri;
- Memperluas cakupan program vaksinasi untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) hingga desa;
- Memajukan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai industri strategis nasional dengan insentif fiskal dan non fiskal;
- Mendorong Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) untuk lebih profesional dalam melakukan pengujian dan pengawasan izin edar terhadap obat, vaksin dan makanan.

17. KARAKTER DAN MARTABAT KEBUDAYAAN NASIONAL YANG KUAT, SEBAGAI JATI DIRI BANGSA

- Memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang berkontribusi terhadap peradaban dunia sebagai bentuk identitas nasional dan kebanggaan di tengah serbuan peradaban global yang sangat masif;
- Menjadikan kebudayaan nasional sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- Memperkuat posisi kebudayaan lokal dari seluruh Indonesia sebagai sumber inspirasi terbentuknya kebudayaan nasional;
- Memperkuat modal sosial (*social capital*) yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan;
- Mendorong terbentuknya kebudayaan baru Indonesia yang bersumber dari warisan budaya lokal serta bersikap selektif, adaptif dan korektif terhadap arus budaya global.
- Memperkuat eksistensi budaya, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat.

MISI 6

MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA SEBAGAI AKAR KEKUATAN BANGSA

Kualitas manusia Indonesia berawal dari keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka kami bertekad untuk mendukung orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. Termasuk di dalamnya: dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya. Negara juga bertanggung jawab atas nasib anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lansia sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia.

Agenda Misi 6

1. MEMULIAKAN IBU

- Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah;
- Memastikan kaum ibu bisa tetap berkarya dalam berbagai peran melalui ketersediaan tempat penitipan anak yang terjangkau dan ruang laktasi di ruang-ruang publik;
- Menghadirkan rasa aman bagi kaum ibu dengan memastikan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Memberikan perhatian khusus kepada kaum ibu yang juga menjadi kepala keluarga melalui pemberian bantuan;
- Memberdayakan kaum ibu untuk berkarya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui aktivasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

2. KESEJAHTERAAN KELUARGA

- Memastikan tersedianya lapangan kerja agar seorang ayah, ibu maupun seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Memastikan biaya hidup yang terjangkau sebagai upaya dukungan negara dalam memastikan kesejahteraan setiap keluarga;
- Memberikan bantuan perlindungan lebih bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia lanjut dan/atau anggota keluarga yang berkebutuhan khusus;
- Mendorong tersedianya ruang-ruang publik, ruang-ruang rekreasi dan olahraga yang ramah bagi seluruh anggota keluarga;
- Memperkuat peran kelembagaan urusan keluarga, perempuan dan anak, untuk menjawab kebutuhan prioritas peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. ANAK SEHAT, CERDAS, DAN BAHAGIA

- Mendorong pemenuhan gizi seimbang bagi setiap anak dan menurunkan risiko obesitas pada anak termasuk melalui pengaturan pada gula, garam dan lemak (GGL) berlebih serta menghadirkan fasilitas dan sarana-prasarana beraktivitas fisik bagi anak;
- Menghadirkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dan terjangkau;
- Menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas untuk kesehatan fisik dan mental;
- Memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya termasuk bagi anak berkebutuhan khusus;
- Menghadirkan ruang-ruang bagi anak untuk mengekspresikan dirinya dengan menghadirkan taman dan ruang publik, lapangan gratis untuk warga, dan perpustakaan yang ramah anak di berbagai daerah;

- Menghadirkan rasa aman bagi setiap anak dengan melindunginya dari segala bentuk perundungan, kekerasan maupun diskriminasi, termasuk edukasi terhadap hak anak;

- Memberikan perhatian khusus kepada anak yatim piatu dan anak terlantar dengan memastikan mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensinya.

4. PENDIDIKAN KELUARGA

- Mendorong keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak khususnya untuk pendidikan karakter;

- Memfasilitasi pembekalan dan pengayaan bagi orang tua dan calon orang tua;

- Melibatkan komunitas dalam pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kepada anak, termasuk kejujuran, semangat juang, dan menghargai perbedaan;

- Memperkuat kelembagaan yang menaungi penyiapan pendidikan keluarga;

- Mendorong peran keluarga dalam membentuk generasi bebas narkoba.

MISI 7

MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA MENINGKATKAN PERAN DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM KANCAH POLITIK GLOBAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERDAMAIAN DUNIA

Mengingat posisi Indonesia sebagai episenter kawasan Asia Tenggara, sekaligus sebagai jalur nadi ekonomi dunia dan stabilisator geopolitik regional, kami bertekad mendorong peran aktif Indonesia dalam penentuan agenda besar dunia dan umat manusia. Hal ini didasarkan pada amanat para pendiri bangsa agar Indonesia secara bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami akan memperkuat sistem dan strategi pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika global era baru yang penuh ketidakpastian, tantangan, serta ancaman konvensional dan nonkonvensional. Selain itu, kami akan memperkuat diplomasi ekonomi dan sosial-budaya agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai potensi global untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan.

Agenda
Misi 7

1. DIPLOMASI EKONOMI

- Menginisiasi, mendorong, dan memfasilitasi kerja sama internasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengambil manfaat dari berbagai kegiatan perekonomian dunia;
- Memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral termasuk menyepakati perjanjian dagang seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) maupun Perjanjian Dagang Terbatas (PTA) untuk mendongkrak daya saing dan daya tarik produk Indonesia;
- Memperkuat posisi Indonesia di berbagai lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk memaksimalkan dukungan dunia internasional bagi pendanaan pembangunan Indonesia;
- Memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara maju yang memberikan transfer ekonomi dan teknologi untuk kemajuan Indonesia, seperti G20, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Organisasi Negara-negara Asia Pasifik (APEC);
- Mendorong implementasi penuh Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan perjanjian ekonomi komprehensif kawasan (RCEP) untuk memajukan pemerataan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi Indo-Pasifik;
- Mendorong peningkatan kerja sama ekonomi *global south* dengan negara berkembang untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi kawasan secara bersama-sama;
- Menyeimbangkan posisi Indonesia dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), BRICS, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mengambil manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.

2. POLITIK LUAR NEGERI BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEMAJUAN

- Menerapkan politik luar negeri Indonesia berbasis nilai dan norma internasional;
- Memosisikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang tatanan global yang mampu mencegah dominasi kekuatan tertentu yang merugikan negara berkembang dan Non-Blok;
- Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik;
- Mengaktifkan peran kepemimpinan Indonesia dan ASEAN terhadap dinamika Indo-Pasifik agar tercipta perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan di kawasan;
- Meneguhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penghubung terhadap beragam inisiatif konektivitas global untuk

mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan kondusif terhadap pembangunan nasional;

- Memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk membangun kepercayaan dunia terhadap penggunaan kekuatan oleh Indonesia untuk perdamaian;

- Memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar melalui modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di darat, patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut sesuai batas kedaulatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan/pulau-pulau terluar;

- Menyelaraskan penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional;

- Mengoptimalkan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara lain dan masalah keamanan lainnya, melalui diplomasi secara damai dan pembangunan kepercayaan internasional.

3. *BRAND* INDONESIA SEBAGAI *SOFT POWER* YANG DIKENAL DUNIA

- Menugaskan setiap Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kantor perwakilan di seluruh dunia untuk berperan sebagai duta perdagangan Indonesia yang mempromosikan produk Indonesia;

- Memulai gelombang budaya dan kreasi yang menampilkan *brand* Indonesia dalam skala global melalui insentif bagi pelaku industri kreatif di Indonesia;

- Menginisiasi pagelaran budaya dan kreasi Indonesia di mancanegara, penguatan diplomasi budaya melalui forum internasional, serta digitalisasi *database* budaya dan kreasi Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat dunia;

- Mendorong pendidikan sebagai sarana penyebaran *brand* Indonesia melalui: (1) ekspansi kerja sama dan bantuan terhadap studi tentang Indonesia di mancanegara, (2) pertukaran pelajar Indonesia untuk belajar di universitas terkemuka di luar negeri, (3) penambahan jumlah beasiswa bagi para mahasiswa dan dosen untuk studi, magang dan riset ke luar negeri, (4) dorongan beasiswa bagi mahasiswa mancanegara untuk studi dan riset di Indonesia, dan (5) intensifikasi kerja sama dengan perguruan tinggi dari negara yang maju dibidang teknologi;

- Menjadikan kuliner sebagai sarana penyebaran *brand* Indonesia ke seluruh dunia melalui fasilitasi dan skema insentif dari perwakilan Indonesia di Luar Negeri untuk memulai program ekspansi pusat UMKM kuliner Indonesia di mancanegara serta insentif ekspor dan *offshoring* industri F&B Indonesia di seluruh dunia;

- Menjadikan olahraga sebagai sarana *brand* Indonesia yang berorientasi terhadap peningkatan prestasi dan reputasi di mata dunia melalui pembinaan, pengembangan, dan pemerataan kemajuan berbagai cabang olahraga khususnya yang dipertandingkan dalam *event* olahraga dunia, termasuk dengan menjamin kesejahteraan para atlet berprestasi dan dukungan penuh bagi organisasi olahraga;

- Mengoptimalkan peran pariwisata sebagai kunci pengenalan *brand* Indonesia melalui penciptaan pariwisata inklusif yang mengakomodasi masyarakat setempat, didukung inisiatif pemerataan tempat wisata di seluruh wilayah Indonesia;

- Mengintensifkan peran dan *brand* Indonesia dalam bidang kemanusiaan melalui peningkatan operasional Indonesia Aid kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan.

4. DIPLOMASI OLEH DAN UNTUK RAKYAT

- Menciptakan tatanan dan regulasi internasional yang sesuai dengan aspirasi juga kepentingan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam forum internasional;
- Mengikutsertakan diaspora Indonesia yang bermukim di segala penjuru dunia sebagai promotor produk Indonesia sekaligus memainkan peran penting sebagai *pulling-factor* bagi ekspor produk Indonesia dengan memberikan beberapa insentif;
- Menginisiasi pelibatan WNI yang ingin melebarkan sayap untuk turut mengenalkan *brand* Indonesia di luar negeri melalui insentif dan kemudahan keimigrasian;
- Memudahkan aktor non-negara di Indonesia untuk melakukan kerja sama transnasional untuk memperlancar kolaborasi ekonomi dan sosial antar negara;
- Menciptakan kerangka kerja sama ketenagakerjaan yang setara bagi setiap pihak untuk mendukung transfer teknologi serta memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak bagi tiap pihak yang terlibat;
- Menginisiasi pemberian dukungan bagi diaspora Indonesia yang mendukung penyebaran *brand* Indonesia kepada masyarakat lintas kelas di seluruh dunia;
- Mengintensifkan perlindungan dan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri, terutama kepada pekerja migran, pelajar kurang mampu, dan WNI lainnya yang menghadapi masalah hukum dan sosial yang mencirikan ketidakadilan di luar negeri;
- Meningkatkan keikutsertaan perempuan Indonesia dalam politik luar negeri nasional untuk menciptakan diplomasi dan kerja sama yang lebih inklusif.

5. KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

- Menjaga amanah Dasasila Bandung KAA 1955 dengan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan, keadilan, dan hak asasi manusia, serta berperan sebagai inisiator resolusi perdamaian serta pembela negara tertindas;
- Mengambil peran sentral dalam kerja sama ekonomi, politik, riset dan teknologi, di antara negara berkembang (*south-south cooperation*) secara bilateral, regional, dan global untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi *global south*;
- Berperan sebagai anggota penting di forum internasional, seperti G20, OKI, dan OECD, agar Indonesia dapat berkontribusi langsung dan ikut menentukan kerangka kebijakan dunia;
- Menginisiasi kerja sama ekonomi berkelanjutan di antara negara dan masyarakat dunia dalam memenuhi SDGs 2030 yang sesuai dengan konteks lokal/ regional dan mendukung munculnya indikator lainnya yang didasarkan kepada *national well-being* dan *national environmental boundary*;
- Menginisiasi kerja sama hijau yang mengakomodasi aspirasi dan situasi tiap negara di dunia melalui program dan mekanisme penanganan perubahan iklim yang memenuhi prinsip keadilan iklim;
- Menginisiasi pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) melalui kerja sama ekonomi, riset dan inovasi berkelanjutan antar negara maju dan berkembang sesuai target SDGs;

- Menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian dunia dengan berperan dalam Pasukan Perdamaian PBB, ekspansi peran mediator perdamaian konflik global, penegasan kepemimpinan Indonesia dalam perumusan agenda perdamaian dunia, dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dunia, termasuk Palestina;

- Meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi beragama yang menjadi rahmat bagi semesta alam dan peningkatan kerja sama antar agama dalam kerangka organisasi internasional.

6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

- Merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional;
- Menganalisis potensi dinamika dunia yang mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia era pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan Indonesia untuk menghadapinya secara adaptif dan dengan membangun kesigapan dan kompetensi;
- Mendorong gelar kekuatan strategis dari Sabang sampai Merauke, didukung oleh Angkatan Darat yang fleksibel dan adaptif, Angkatan Laut yang menjadi *blue water navy*, serta Angkatan Udara yang terotomatisasi dan mampu meraih supremasi udara;
- Mewujudkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kesiapan dan latihan tempur segenap satuan TNI sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya;
- Mendorong ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif terhadap kapabilitas lawan melalui penuntasan program Minimum Essential Force, peningkatan dan pelaksanaan program Essential Force pasca-2024, dan pengadaan alutsista *network-centric*;
- Meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan melalui transfer teknologi, akuisisi alutsista berteknologi tinggi, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri;
- Mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, pengindraan jarak jauh, serta intelijen pengamatan dan pengawasan;
- Mendorong jumlah TNI perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI.

7. ADAPTIF DAN KOMPETEN TERHADAP ANCAMAN BARU NON TRADISIONAL

- Menciptakan strategi ketahanan nasional komprehensif bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan ancaman non konvensional di dalam zona abu-abu serta peperangan hibrida lintas dimensi;
- Meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan non konvensional;
- Mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan yang dapat muncul akibat bencana alam, dinamika politik, perang ekonomi, pandemi, peperangan hibrida, dan lainnya;
- Mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman non-negara seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, pembajakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan sengketa wilayah.

MISI 8

MEMULIHKAN KUALITAS DEMOKRASI, MENEGAKKAN HUKUM DAN HAM, MEMBERANTAS KORUPSI TANPA TEBANG PILIH, SERTA MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT

Kami percaya menegakkan hukum dan merawat demokrasi adalah syarat hadirnya keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Kami akan kembali pada amanat reformasi, menyempurnakan otonomi daerah, meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih.

Agenda Misi 8

1. SISTEM HUKUM YANG ADIL, TRANSPARAN DAN MENGAYOMI

- Memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;
- Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak Hukum (APH) dijadikan alat politik;
- Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH;
- Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan;
- Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh;
- Memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan WNI yang tinggal di luar negeri;
- Penguatan kualitas manusia bidang hukum, dengan:
    - Memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi APH meliputi Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi;
    - Mewajibkan pejabat APH untuk melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara periodik dengan standar pelaporan yang lebih akuntabel;
    - Memperbaiki kesejahteraan APH dengan pengukuran kinerja yang lebih objektif; dan
    - Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat APH termasuk di lingkungan peradilan.
- Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, (pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial) yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan;
- Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM;
- Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.

2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

- Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2029);

- Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta;
- Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN;
- Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain;
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi;
- Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih;
- Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.

3. BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MELAYANI

- Menghadirkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial;
- Penyesuaian struktur organisasi birokrasi untuk mengantisipasi dan merespons kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi dan pergeseran sosial-budaya;
- Mengurangi tumpang tindih fungsi dan tugas birokrasi guna mendongkrak kinerja dan efisiensi birokrasi;
- Memperluas reformasi birokrasi tematik dengan lima indikator utama yaitu: (1) penurunan kemiskinan, (2) peningkatan investasi, (3) digitalisasi pemerintahan, (4) lingkungan hidup berkelanjutan, dan (5) pelayanan publik;
- Menyederhanakan sistem akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga pendidikan, peneliti, kesehatan, dan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja;
- Menerapkan prinsip meritokrasi dari proses seleksi masuk hingga promosi jabatan, sebagai fondasi dari penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbasis kinerja;
- Mengoptimalkan integrasi data pemerintah termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai Basis Data Tunggal pelayanan publik yang efisien dan transparan;
- Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, serta melanjutkan program Open Government Indonesia (OGI);
- Mencegah politisasi birokrasi melalui pembentukan hubungan kemitraan yang profesional dan proporsional antara politisi dengan pejabat birokrasi;
- Memperbaiki sistem pensiun, untuk memberikan jaminan kesejahteraan akan kesejahteraan para ASN di masa tua.

4. OTONOMI DAERAH YANG PARIPURNA

- Mengakhiri tarik menarik kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan pendekatan komunikasi, regulasi, birokrasi dan fiskal;
- Memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola potensi kekayaan yang dimilikinya;

- Mendorong Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer Daerah;
- Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah;
- Mendorong kerja sama antar daerah otonom dalam mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya;
- Memberikan tanggung jawab penuh kepada Pemda terkait kewenangan yang sudah diberikan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat;
- Memberikan sumber keuangan kepada Pemda, untuk membiayai dan mendukung kewenangan yang telah didesentralisasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus/ Dana Keistimewaan yang ditentukan secara adil dan transparan;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target dan capaian yang lebih terukur;
- Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan secara selektif memfasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), merevitalisasi Unit-Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan-Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT);
- Mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengawal otonomi daerah.

5. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menjaga profesionalisme Polri dengan memastikan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi yang mengedepankan akuntabilitas dan meritokrasi;
- Mendorong penguatan pengawasan internal Polri melalui pelibatan masyarakat, penguatan peran Kompolnas, serta perbaikan sistem kesejahteraan anggota Polri demi Polri yang bersih dan melayani;
- Memperkuat kemampuan manusia, fasilitas, sistem dan teknologi, untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota Polri tentang prinsip dan norma hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- Mengedepankan upaya pencegahan dan pendekatan dialogis yang proaktif dan humanis dalam menyelesaikan masalah keamanan dan sosial di masyarakat;
- Mendorong dan memperkuat Hubungan Internasional Polri guna mencegah dan menyelesaikan kejahatan transnasional;
- Memberantas judi *online*, pinjaman *online* ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan praktik negatif atau kejahatan lain yang merusak generasi muda bangsa melalui pendekatan edukasi dan penegakkan hukum;
- Mengembangkan sistem digital untuk seluruh layanan masyarakat di institusi Polri agar transparan, mudah, nyaman dan meminimalkan praktik pungutan liar;
- Mendorong jumlah Polisi Wanita untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen Polri.

6. DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

- Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil;
- Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

- Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi;
- Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih;
- Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;
- Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan;
- Menyediakan Dana Penyehatan Demokrasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil Indonesia;
- Membangun pemahaman rakyat terhadap demokrasi, melalui berbagai pendidikan publik, kampanye dan program penguatan literasi;
- Menyederhanakan persyaratan dan prosedur pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan.

Agenda Strategis

8 Sayap Kemajuan

Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan. Sejalan dengan hal ini, kami menyusun agenda strategis, yang meliputi pengembangan delapan kawasan di Indonesia, yang kami sebut dengan **"8 Sayap Kemajuan"**, yaitu:

SUMATRA

JAWA

KALIMANTAN

BALI &
NUSA
TENGGARA

SULAWESI

MALUKU

PAPUA

KAWASAN
PESISIR,
KEPULAUAN &
PEDALAMAN

Sumatra

Jembatan Menuju Komunitas Global

1. Peningkatan kualitas dan stabilitas harga jual, serta industrialisasi **karet dan sawit**

2. Membangun **jaringan transportasi lintas Sumatra yang terhubung dengan Jawa** melalui penguatan peran jalan tol, jalur kereta api, dan penyeberangan Selat Sunda

3. **Peningkatan panjang dan kualitas jalan nasional, provinsi, kabupaten serta desa**, untuk memastikan potensi ekonomi di Sumatra termanfaatkan dengan baik

4. **Menjadikan Kuala Tanjung sebagai simpul internasional** di wilayah Indonesia Bagian Barat

5. **Penguatan industri/ekonomi maritim di sekitar Selat Malaka** dan **mewujudkan konektivitas Sumatra-Jawa-ASEAN**

6. Menyederhanakan dan memudahkan proses **legalitas tanah ulayat/tanah adat**

7. **Pengembangan KEK Sumatra** sebagai pusat produksi **berstandar global yang ramah lingkungan**

8. **Pencegahan kebakaran hutan secara masif dan sistematis**, untuk menghindari gangguan ekonomi dan kesehatan rakyat

9. Kepastian **kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah Natuna**, termasuk dari aktivitas pencurian ikan dan penyelundupan.

10. Kepastian **peningkatan pemanfaatan migas, batubara, dan sumber daya mineral** lainnya

11. **Percepatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi,** melalui insentif fiskal dan non fiskal

12. Mengembangkan **industri pariwisata dan industri halal** memanfaatkan potensi budaya, keindahan alam dan kreativitas, dengan melibatkan UMKM lokal

13. **Apresiasi, pelestarian, dan pengembangan budaya Sumatra** agar semakin menasional dan mendunia

14. Meningkatkan **produktivitas dan ketahanan pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan implementasi penerapan teknologi yang berbasis komoditas unggulan** meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya

15. Meningkatkan **kualitas manusia khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan** termasuk keselarasan pendidikan dan potensi lokal

16. Perluasan **pemanfaatan sumber daya maritim melalui pengembangan ekonomi biru** untuk meningkatkan kemajuan dan pemerataan ekonomi khususnya pada wilayah kepulauan

Jawa
Fondasi Ekonomi yang Berkelanjutan

1. **Jabodetabek menjadi pusat ekonomi dan bisnis berkelanjutan dan berskala global** yang ditunjang dengan kemudahan berinvestasi, kelancaran mobilitas orang dan barang, kesiapan menghadapi banjir dan penurunan muka air tanah, serta pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga, termasuk jaringan telekomunikasi dan informasi digital

2. **Kawasan metropolitan menjadi pusat pemerataan ekonomi berkelanjutan** yang ditunjang dengan pemenuhan infrastruktur dasar, termasuk jaringan telekomunikasi dan informasi digital bagi warga, penyediaan hunian terjangkau di pusat kota, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan sektor usaha unggulan, seperti pariwisata, perdagangan, industri inovasi kreatif dan teknologi, serta industri pengolahan

3. **Wilayah sentra industri dengan komoditas unggulannya bangkit menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja** yang ditunjang oleh keterhubungan dengan pelabuhan dan pasar melalui angkutan barang multimoda yang efektif dan efisien serta penambahan sarana dan prasarana logistik yang memadai, seperti *dry port* dan pergudangan

4. **Kota-kota lain di pulau Jawa menjadi pusat kegiatan yang menjembatani perkotaan metropolitan dan pedesaan** dengan ditunjang penyediaan hunian terjangkau di pusat kota, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, sistem transportasi umum yang mudah dan murah, pemenuhan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ruang publik

5. **Kawasan pedesaan menjadi pusat pangan, pariwisata, kebudayaan, dan sumber kekayaan alam** yang ditunjang dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi warga, meningkatnya dukungan bagi Pemerintah Desa serta bantuan bagi petani dan nelayan serta tersedianya infrastruktur penghubung antarwilayah

6. **Kawasan Pesisir Utara dan Selatan menjadi pusat pariwisata, industri perikanan, dan sumber kekayaan alam** yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, penyiapan ekosistem alam, dan kapasitas adaptasi masyarakat untuk mitigasi bencana pesisir serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur penghubung dengan kota

7. **Transisi energi dipercepat** melalui pengembangan sumber terbarukan sesuai dengan potensi lokal dari setiap daerah, seperti eksplorasi geothermal, PLTS, dan PLTA, pemensiunan dini PLTU, serta pengembangan sistem ketenagalistrikan

8. **Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis dipulihkan sebagai sumber air baku untuk air minum dan pondasi ketahanan air di Pulau Jawa,** meliputi DAS Citarum, Cisadane, Ciliwung, Brantas, dan Bengawan Solo

9. **Pelabuhan Patimban** memiliki fasilitas lengkap dan terintegrasi secara fisik dengan angkutan barang multimoda yang efisien dan secara data dan informasi dengan National Logistics Ecosystems

10. **Bandara Kertajati** menjadi sentra perawatan dan perbaikan pesawat serta pusat pengembangan dan riset industri teknologi tinggi yang terhubung dengan akses logistik multimoda

11. **Tol Transjawa** dituntaskan pembangunannya hingga Banyuwangi, pembangunan jalan arteri sebagai akses tol, dan penyesuaian tarif bagi kendaraan logistik

12. **Percepatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi,** melalui insentif fiskal dan non fiskal

Kalimantan

Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri

1. Menjadikan **Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau** termasuk melalui insentif bagi yang jaga hutan, reforestasi, dan lainnya

2. Menjadikan Kalimantan Lumbung Energi Terbarukan melalui **pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBm (biomassa), pengembangan PLTS,** dan program lainnya

3. **Memastikan bagi seluruh kota dan desa** teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, fasilitas kesehatan dan pendidikan dekat, termasuk pada daerah perbatasan

4. **Melibatkan masyarakat lokal** dalam tiap tahap pembangunan dan menguatkan **pengakuan hak ulayat** masyarakat adat

5. **Memastikan hak masyarakat lokal** dalam pengelolaan SDA (misalnya: pertambangan, perkebunan)

6. Mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik **industri padat karya** (contoh: tekstil, furnitur), pabrik **inovasi tinggi** (misalnya: petrokimia, bioteknologi), dan **pabrik industrialisasi komoditas unggulan** (termasuk kelapa sawit, kakao, hasil hutan) yang berjalan dengan **prinsip ESG**

7. Mewujudkan pembangunan **infrastruktur kereta** yang mengalungi Kalimantan, dengan penahapan yang optimal

8. Memastikan **transportasi** udara, darat, dan air (sungai dan laut) yang **terjangkau dan saling terhubung**

9. Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah tambang/industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut

Bali dan Nusa Tenggara

Gerbang Pariwisata, Gapura Keberagaman, Pagar Kebudayaan

1. **Menduniakan pariwisata Bali dan Nusa Tenggara** dengan menggerakkan ekonomi lokal serta memperhatikan kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan pemajuan kebudayaan daerah

2. **Antar Pulau terhubung:**
   a. Penambahan dan pembaruan kapal penumpang dan kapal perintis
   b. Dukungan subsidi ongkos transportasi air agar lebih terjangkau
   c. Revitalisasi pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Benoa, Lembar, Kupang, Celukan Bawang, Bima dan Labuan Bajo

3. **Menjadikan Bali dan Nusa Tenggara sebagai teladan baik kerukunan dalam keberagaman** dengan kehidupan masyarakat yang berdampingan dari ragam latar belakang

4. **Peningkatan potensi lumbung pangan:**
   a. Kepastian ketersediaan pupuk murah dan bibit bermutu
   b. Perbaikan dan pembaruan sistem irigasi
   c. Kepastian pembelian hasil panen
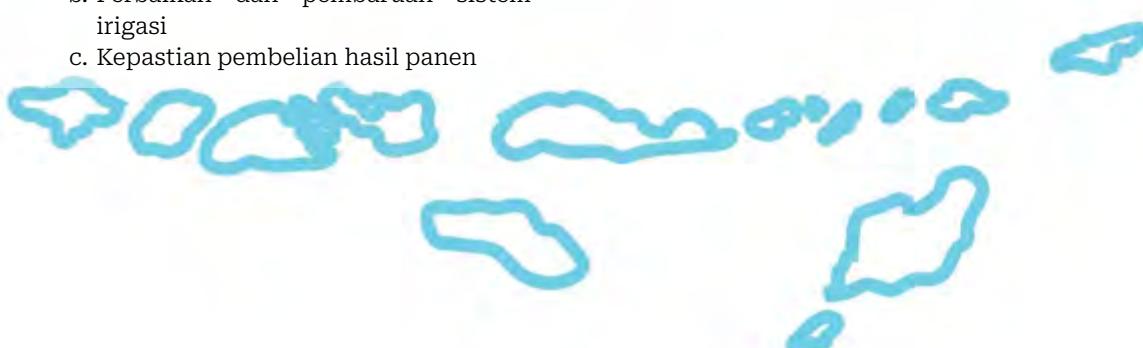
5. **Pengentasan kemiskinan ekstrem** khususnya di wilayah Nusa Tenggara

6. **Kepastian bagi seluruh kota dan desa tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, angkutan umum murah tersedia, teraliri listrik serta terhubung internet**

7. **Percepatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi,** melalui insentif fiskal dan non fiskal

8. **Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas mudah diakses:**
   a. Layanan kesehatan di setiap desa, berisi dokter, perawat, bidan dan ambulans
   b. Perbaikan gedung sekolah, akses ke sekolah (jalan dan angkutan) serta kehadiran guru di kelas
   c. Pendidikan yang selaras dengan potensi lokal

Sulawesi
Kemakmuran di Timur

1. **Mendorong industrialisasi hasil bumi untuk meningkatkan nilai tambah produk, dan menjadikan Sulawesi:** (a) Pusat cokelat dunia, (b) Basis nikel nasional, dan (c) Lumbung pangan nasional

2. **Memastikan masyarakat Sulawesi mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya alam** dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas, aktivitas ekonomi yang menyejahterakan, penerimaan pajak yang dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan, dan lingkungan yang tetap terpelihara

3. **Meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura** melalui: (a) Kolaborasi universitas, swasta/UMKM, dan pemerintah dalam peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM, (b) Pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tersedia dan mudah diakses, (c) Kepastian harga beli dan rantai distribusi komoditas hortikultura, dan (d) Regenerasi petani dengan memberikan insentif dan stimulus terhadap generasi muda agar mau bertani

4. **Menjadikan Sulawesi sebagai pusat riset dan inovasi di kawasan Timur Indonesia** dengan mendorong universitas-universitas yang ada sebagai universitas riset unggulan

5. **Membangun jaringan logistik dan transportasi yang murah dan efisien**, melalui:
   a. Melanjutkan pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi jalur Makassar-Parepare sampai Palu hingga 2029
   b. Integrasi dan tata kelola yang baik terhadap sektor transportasi publik (integrasi Pete-Pete, pengembangan bus dalam kota).
   c. Melanjutkan pembangunan jalan tol trans Sulawesi sebagai upaya menciptakan kemudahan mobilitas individu dan komoditas
   d. Optimalisasi ALKI II dan III menghubungkan rantai pasok komoditas.
   e. Pembangunan dan pengembangan dry port lintas kabupaten dan provinsi

6. **Penataan pariwisata berbasis laut dan historis** dengan penerapan prinsip berkelanjutan (eco-tourism) melalui pelibatan komunitas dan UMKM lokal

7. **Pengembangan Energi Terbarukan** dengan mengembangkan: (a) Pusat industri baterai mobil listrik, (b) PLTB percontohan Kabupaten Sidrap, dan (c) PLTS percontohan Kabupaten Minahasa Utara

Maluku

Kebangkitan Ekonomi Maritim dari Timur

1. **Hasil laut untuk kejayaan masyarakat Maluku:**
   Perbaikan sarana prasarana (pelabuhan, kapal ikan, perahu nelayan), kepastian pembelian hasil tangkapan dan dukungan permodalan, tindak tegas *illegal fishing,* serta industri pengolahan hasil laut dikembangkan

2. **Antar Pulau terhubung:** Penambahan dan pembaruan kapal penumpang dan kapal perintis, dukungan subsidi ongkos transportasi air agar lebih terjangkau, serta revitalisasi pelabuhan diantaranya Pelabuhan Yos Sudarso, Amahai, Tual, Namlea dan Saumlaki

3. **Pemberdayaan potensi pariwisata alam, pantai dan situs sejarah yang menggerakkan ekonomi lokal**, seperti Pulau Morotai, Banda Neira, Benteng Belgica dan Tolukko dan potensi lokasi wisata lainnya

4. **Menggaungkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia** dengan menghadirkan ruang-ruang pertunjukan serta memperluas kesempatan bagi talenta lokal untuk tumbuh dan naik kelas

5. **Hilirisasi tambang untuk kesejahteraan masyarakat:** menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar, serta pengolahan limbah tambang ramah lingkungan termasuk di Halmahera dan Namlea.

6. **Pemanfaatan gas bumi secara berkelanjutan:** Maluku memiliki cadangan gas bumi terbesar di Indonesia

7. **Kebutuhan pangan tersedia dengan harga terjangkau** dengan rantai pasok pangan yang efisien

8. **Kepastian bagi seluruh kota dan desa tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, angkutan umum murah tersedia, teraliri listrik serta terhubung internet**

9. **Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses,** termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan ambulans antar pulau serta pendidikan yang selaras dengan potensi lokal.

Papua
Pemerataan Sempurna

1. **Pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik** melalui cara-cara yang saling menghormati dan menghargai seluruh pihak

2. **Pembangunan hijau dan berkelanjutan** dengan menghormati otonomi khusus dan hak ulayat masyarakat adat

3. **Industrialisasi** barang substitusi impor pangan dan non-pangan dengan KEK Sorong **sebagai hub utama**

4. **Mendorong ketahanan pangan** melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) sebagai aktor utama

5. **Revitalisasi pelabuhan** Biak, Jayapura dan Samabusa Nabire untuk akses masuk utama barang dan jasa di wilayah utara serta Pelabuhan Pomako Mimika dan Merauke untuk wilayah selatan

6. **Melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua** dengan fokus meningkatkan kehadiran jalan nasional minimal di 90% kab/kota dan 100% jalan penghubung antar kab/kota dalam kondisi baik

7. **Pengaspalan lebih dari 1.700 km jalan Trans Papua** yang masih dalam kondisi tanah dan kerikil

8. **Mengoptimalkan kolaborasi BUMN transportasi dan swasta untuk menurunkan biaya logistik** menuju dan di dalam Papua

9. **Mengoptimalkan bandara Mozes** Kilangin sebagai hub jaringan logistik udara untuk wilayah pegunungan

10. **Menurunkan durasi pengiriman barang Jawa-Timika-Pegunungan Tengah** melalui pola distribusi dan rantai pasok yang lebih efisien

11. **Memastikan kehadiran puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua** untuk mengangkat taraf kesehatan masyarakat

12. **Memastikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas yang berkualitas dibangun** di seluruh wilayah Papua untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak Papua

13. **Memastikan talenta dari Papua ikut terlibat aktif** dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor dan institusi

14. **Mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet murah** dan berkualitas di seluruh wilayah Papua

Kawasan Pesisir dan Kepulauan

Pilar Pemerataan Pembangunan

1. **Meningkatkan kualitas manusia** melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah, dan mudah diakses
2. **Meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan air bersih dan sanitasi yang layak** untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
3. **Meningkatkan besaran dana desa** bagi kawasan pesisir dan kepulauan
4. **Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sistem logistik** untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari
5. **Mengembangkan perekonomian pesisir dan kepulauan** dengan bantuan permodalan ringan untuk industri wisata bahari dan setiap tahapan produksi di industri perikanan
6. **Mitigasi bencana alam dan lingkungan di kawasan pesisir** dengan melestarikan dan mengembangkan ekosistem alam serta membangun infrastruktur
7. **Terhubung mudah dengan daerah lainnya** melalui sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik untuk keperluan mobilitas harian maupun pariwisata
8. **Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus** dengan mengutamakan potensi EBT lokal
9. **Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal**, yang memungkinkan masyarakat pesisir dan kepulauan terhubung dengan penduduk kawasan lainnya
10. **Kawasan di perbatasan negara terbangun dan tumbuh ekonominya** secara mandiri dan berkelanjutan

Kawasan Pedalaman

Maju Bersama, Menjunjung Pemerataan

1. **Meningkatkan kualitas manusia** melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah, dan mudah diakses
2. **Meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan air bersih dan sanitasi yang layak** untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
3. **Meningkatkan besaran dana desa** bagi kawasan pedalaman
4. **Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sistem logistik** untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari
5. **Akses terhadap tanah dan sumber daya agraria yang dimiliki negara semakin kuat bagi petani gurem dan petani tak bertanah**
6. **Sumber daya alam di kawasan pedalaman dilindungi, dilestarikan, dan dikelola secara berkelanjutan**
7. **Terhubung mudah dengan daerah lainnya** melalui sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik untuk keperluan mobilitas harian maupun pariwisata
8. **Kawasan di perbatasan negara terbangun dan tumbuh ekonominya** secara mandiri dan berkelanjutan
9. **Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus** dengan mengutamakan potensi EBT lokal
10. **Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal**, yang memungkinkan masyarakat pedalaman terhubung dengan penduduk kawasan lainnya

8 Sayap Kemajuan

Agenda Khusus

28 Simpul Kesejahteraan

Kami juga menginisiasi “Agenda Khusus” yang berisi manfaat yang akan diterima oleh 28 kelompok masyarakat, karena kami meyakini kesejahteraan kelompok masyarakat ini berdampak besar pada kesejahteraan Indonesia. Kami menyebut agenda ini sebagai **“28 Simpul Kesejahteraan”** yaitu:

1. Petani
2. Nelayan
3. Peternak
4. Pekebun Sawit
5. UMKM
6. Pelaku Usaha Besar
7. Pekerja Kreatif
8. Santri
9. Atlet
10. Siswa dan Mahasiswa
11. Kelompok Disabilitas
12. Anak-anak Indonesia
13. Seniman & Budayawan
14. Lansia
15. Perempuan
16. Tenaga Kesehatan
17. Buruh
18. Pekerja Migran Indonesia
19. Gen Z dan Millenial
20. Warga Kota
21. Warga Desa
22. Guru dan Tenaga Pendidik
23. Aparat Sipil Negara (ASN)
24. Dosen dan Peneliti
25. Masyarakat Adat
26. Pers dan Media
27. Diaspora
28. Investor dan Pelaku Pasar Modal/Uang

Petani tenang, Petani untung, Petani bisa menabung

1. Petani mendapatkan **pupuk dengan harga murah, berkualitas dan mudah didapat**
2. Memberikan **kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan** bagi petani
3. **Irigasi dibangun dan diperbaiki**, petani tidak sulit mencari air
4. **Jalan-jalan desa diperbaiki** sehingga mengangkut hasil panen menjadi mudah
5. **Meminimalkan impor pangan** agar hasil petani banyak yang beli
6. **Kemudahan pemberian bantuan bibit/benih** yang **bermutu sesuai** dengan **kebutuhan petani**
7. **Bantuan permodalan murah dan mudah bagi petani** pada **setiap tahapan produksi**
8. **Semakin banyak bantuan alat dan mesin-alat pertanian dengan teknologi terkini** termasuk a**lat pengering dan fasilitas gudang** dari pemerintah
9. **Memastikan harga panen terjaga** agar menguntungkan petani
10. **Petani dapat memanfaatkan lahan menganggur milik pemerintah dan BUMN**
11. **Pemerintah mendorong Kemandirian Pangan**, produksi pertanian dalam negeri akan ditingkatkan, petani mendapat banyak perhatian

Nelayan senang, Nelayan untung, Nelayan bisa menabung

1. **Solar murah dan mudah didapat**, ada bantuan dari pemerintah
2. **Pemberian bantuan alat tangkap ikan dan peralatan melaut** dari pemerintah
3. **Mengurus izin melaut dipermudah**
4. Memastikan **harga hasil tangkapan makin menguntungkan** nelayan
5. Memberikan **kebijakan pungutan hasil tangkap yang adil** bagi nelayan
6. **Permodalan mudah dan murah** dibantu Pemerintah untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan
7. Perluasan pemberian p**erlindungan keselamatan kerja bagi Anak Buah Kapal dan nelayan**
8. **Kapal ilegal pencuri ikan akan ditangkap dan disanksi berat**
9. **Istri nelayan dibantu berbisnis** (dagang, industri rumah tangga, dll), sehingga bisa bantu suami mengumpulkan uang, melalui pelatihan dan pendampingan
10. **Rumah nelayan akan dibantu untuk menjadi sehat, layak dan nyaman**
11. **Pemerintah mendorong Kemandirian Pangan**, produksi hasil laut dalam negeri akan ditingkatkan, nelayan mendapat banyak perhatian

Peternak untung, Peternak bisa menabung

1.	**Bibit ternak murah dan mudah didapat**, dibantu pemerintah
2.	**Pakan ternak murah dan mudah didapat**, dibantu pemerintah
3.	**Penyederhanaan izin** untuk memudahkan pelaku usaha peternakan
4.	Kepastian **pengawasan untuk membentuk pasar yang adil** bagi peternak
5.	**Obat-obatan ternak murah dan mudah didapat**, dibantu pemerintah
6.	**Sertifikasi peternakan mudah dan cepat didapat**
7.	**Harga hasil ternak makin menguntungkan peternak**
8.	**Modal dibantu pemerintah, mudah dan murah**, tidak perlu utang pinjol ilegal dan rentenir
9.	**Produksi dalam negeri diutamakan** dengan harga yang adil
10.	**Pemerintah mendorong Kemandirian Pangan,** produksi ternak dalam negeri akan ditingkatkan, peternak mendapat banyak perhatian

Pekebun Sawit
Tenang, Pekebun Sawit Untung
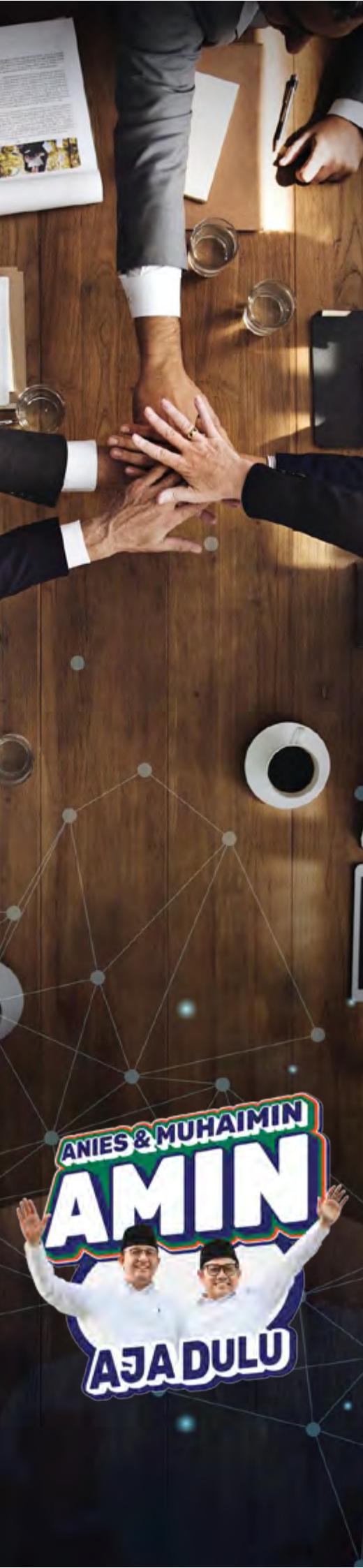
1.	**Pupuk mudah didapat dan murah,** dibantu pemerintah
2.	**Harga bibit sawit murah, mudah didapat, dijamin berkualitas**
3.	**Harga jual hasil panen menguntungkan** pekebun
4.	**Reforma agraria** untuk pekebun sawit
5.	**Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)** pekebun sawit **mudah dan cepat didapat**
6.	**Pengawasan ketat untuk membentuk pasar yang adil** bagi pekebun sawit
7.	**Peremajaan tanaman sawit dipercepat**, dibantu pemerintah
8.	**Modal dibantu Pemerintah, mudah dan murah**, tidak perlu utang pinjol dan rentenir
9.	**Akses pasar dunia dibuka luas bagi Pekebun Sawit Indonesia**, difasilitasi pemerintah

UMKM
Laris dan Pasarnya Makin Luas

1. **“Jemput bola” untuk mengurus izin**
2. **Bantuan modal dari pemerintah,** mudah dan aman
3. **Bantuan pelatihan produksi, pemasaran, dan teknologi diberikan secara gratis**
4. **Kemitraan antara Korporasi dan UMKM** dikembangkan
5. **BUMN, BUMD dan pemerintah akan mengutamakan belanja dari produk-produk UMKM**
6. **Perlindungan bagi UMKM dari pelaku asing yang membunuh pesaing dengan harga murah**
7. **Akses pasar dunia dibuka luas bagi UMKM Indonesia**, difasilitasi Pemerintah
8. **Ongkos kirim produk UMKM ke luar Pulau Jawa murah**
9. Kemudahan melakukan **sertifikasi halal**

Pelaku Usaha Besar Terkemuka dan Menggglobal

1. **Regulasi dari tingkat pusat hingga daerah yang memberi kepastian berusaha**, tidak berubah-ubah setiap saat
2. Kepastian **integrasi sistem perizinan dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah**
3. **Fasilitasi kepada BUMN dan korporasi besar** sehingga dapat **berkompetisi pada skala global**
4. **Pemerintah memfasilitasi negosiasi terkait perdagangan luar negeri yang berpihak pada pengusaha dalam negeri**
5. Berbagai **insentif diberikan baik kepada investor yang sudah ada maupun investor baru,** adil tidak pilih kasih
6. **Mengurus izin, mendapatkan kredit, membayar pajak, melakukan ekspor-impor dibuat terintegrasi dan mudah**
7. **Infrastruktur dasar memadai mencakup listrik dengan harga yang kompetitif** serta **transportasi dan logistik yang pasti dan terintegrasi**
8. ***E-government* diterapkan, mempermudah segala urusan dengan pemerintah, layanan berkualitas**
9. **Birokrasi dari pusat hingga daerah** aktif melayani investasi

Pekerja Kreatif:

Makin Mudah Berkarya, Makin Diapresiasi, dan Makin Sejahtera

1. Ruang berkreasi tersedia, mudah dan murah
2. Penyediaan bantuan keuangan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif
3. Para pekerja kreatif, termasuk pekerja kreatif senior, akan mendapatkan penghargaan dan disejahterakan
4. Pusat budaya dan sinema kelas dunia akan dibangun di berbagai kota di Indonesia, dengan sewa yang murah
5. Budaya sinema, akan dikembangkan; sekolah film dibangun, gedung bioskop tumbuh di banyak kota
6. Festival seni seperti Festival Film Indonesia diadakan dengan standar kelas dunia dan difasilitasi pemerintah
7. Performing *right* dan royalti dijamin, termasuk royalti bagi konten kreator di media sosial
8. Memperketat regulasi impor barang-barang seni dan kerajinan (termasuk jilbab, batik, baju) dari luar negeri melalui media sosial dan mempermudah ekspor bagi pekerja kreatif

Santri Tauladan, Pesantren Gemilang

1. Kepastian atas kekhasan dan otonomi pesantren
2. Ijazah Pesantren disetarakan dengan sekolah umum, bisa untuk melanjutkan sekolah atau pencarian kerja
3. Fasilitas pesantren akan diperbaiki, dengan dukungan dari pemerintah
4. Guru pesantren akan disejahterakan dengan bantuan dari pemerintah
5. Beasiswa untuk para santri diperbanyak, bisa sekolah di dalam maupun luar negeri
6. Pertukaran pelajar untuk para santri, dengan luar negeri akan digiatkan
7. Pelatihan kewirausahaan akan didorong di pesantren-pesantren, para santri siap menjadi wirausahawan

Atlet Indonesia Berprestasi & Mendunia

1. **Menjamin kesejahteraan atlet, perangkat atlet, dan atlet purnabakti** melalui insentif atlet berprestasi dan skema jaminan pensiun yang layak.
2. **Menghadirkan fasilitas olahraga yang berkualitas** mencakup pembangunan stadion, sekolah atlet, dan layanan kesehatan bagi para atlet di tiap daerah.
3. **Menerapkan paradigma *sport science*** sebagai basis tata kelola kelembagaan olahraga yang lebih terstruktur, efisien, transparan dan akuntabel.
4. **Memastikan manajemen asosiasi olahraga nasional yang profesional, transparan, akuntabel, dan independen.**
5. **Memastikan keberpihakan dan dukungan bagi para atlet untuk produktif dan berprestasi**, termasuk beasiswa khusus bagi calon atlet yang berpotensi.
6. **Menghapus diskriminasi dan menghadirkan kesetaraan** dalam ekosistem keolahragaan di tiap cabang olahraga.
7. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung keolahragaan** mulai dari pelatih, wasit, tim medis dan tim kebugaran secara meritokrasi.

Siswa dan Mahasiswa

Sekolah Berkualitas, Biaya Terjangkau, dan Tuntas

1. **Tidak pusing lagi akibat PPDB Zonasi** karena daya tampung sekolah negeri diperbanyak dan sekolah swasta ditingkatkan kualitasnya.
2. **Tenang melanjutkan sekolah dengan KIP Plus**, akan ada bantuan tambahan untuk jenjang pendidikan berikutnya, diberikan di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA
3. **Semua bisa kuliah karena biaya kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus** (perluasan penerima manfaat untuk kelompok menengah, yaitu UMR+10%)
4. **Kesempatan beasiswa di dalam negeri dan luar negeri terbuka luas,** lewat LPDP, IISMA, dan program lain
5. **Program beasiswa dalam negeri dan luar negeri termasuk persiapan bahasa asing**
6. **Perundungan/bullying dilarang keras di sekolah**, ada sanksi berat bagi pelaku dan orang tuanya, ada hotline terintegrasi antara Kemendikbud, Fasilitas Kesehatan dan Kepolisian
7. **Kesehatan mental siswa & mahasiswa dijaga**, melalui peer counselor, kehadiran konselor di sekolah dan perguruan tinggi

Kelompok Disabilitas

Dilindungi, Dihormati dan Difasilitasi

1. **Seluruh layanan publik** (transportasi umum, taman, trotoar, dan lain-lain) **harus ramah disabilitas**

2. **Juru Bahasa Isyarat (JBI) hadir di berbagai kegiatan untuk umum**

3. **Sekolah inklusif diperbanyak**, Sekolah Luar Biasa (SLB) ditingkatkan kualitasnya

4. **Kesempatan beasiswa khusus disabilitas semakin banyak**

5. **Bantuan sosial untuk disabilitas diperbesar manfaat dan jumlah penerimanya**

6. **Kuota khusus dalam lowongan kerja dan pengembangan wirausaha** untuk mewujudkan disabilitas berdaya dan berkarya

7. **Penghargaan untuk kota, perusahaan, atau instansi yang peduli pada kelompok disabilitas**

Anak Indonesia
Sehat, Cerdas, Berprestasi & Bahagia

1. **Taman dan tempat bermain bagi anak yang mudah diakses dan gratis diperbanyak**
2. **Bantuan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk anak**
3. **Pengendalian produk makanan yang membahayakan kesehatan anak**
4. **Wajib Belajar 1+12 tahun dari PAUD hingga SMA**
5. **Memastikan materi pembelajaran di sekolah disampaikan dengan cara yang mengasyikkan bagi anak**
6. **Fasilitas dan kompetisi seni dan olahraga untuk anak diperbanyak agar mereka tumbuh sehat dengan bahagia**
7. **Anak yatim piatu dan anak terlantar diperhatikan dengan memastikan kesejahteraannya**
8. **Edukasi untuk orang tua dan calon orang tua tentang psikologi dan pendidikan anak**
9. **Tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau**

Budaya Dikembangkan, **Budayawan** Disejahterakan

1. **Dana Abadi Kebudayaan** jumlahnya makin besar, pemanfaatannya makin beragam
2. **Beasiswa khusus untuk seniman dan budayawan diperluas** termasuk untuk belajar hingga S2/S3 di Luar Negeri, **pemerataan pendidikan seni dan budaya** serta **kesempatan belajar bersama maestro**
3. **Seniman tangguh dan para tokoh budayawan dimuliakan** melalui program “Maestro Nasional”
4. **Pusat-pusat budaya dibangun dan dikembangkan di banyak daerah di Indonesia**, baik untuk budaya tradisional maupun kontemporer, **dihidupkan dengan kolaborasi bersama komunitas**
5. **Revitalisasi museum dan kawasan cagar budaya**
6. **Ruang pertunjukan berjenjang dari daerah hingga nasional** untuk seniman dapat bertumbuh
7. **Dukungan dari pemerintah, BUMN dan Swasta bagi kegiatan budaya dan pertunjukan kesenian**
8. **Pemerintah menghubungkan swasta/BUMN dengan seniman, untuk menjamin kemitraan dan dukungan yang berkelanjutan**

Lansia Tenang, Lansia Bahagia

1. **Bantuan sosial khusus lansia** dengan manfaat dan jumlah penerimanya diperbesar
2. **Lansia mudah berobat** melalui jalur antrean khusus, armada ambulans tambahan, serta jemput bola pemeriksaan dan pengobatan
3. **Lansia hidup dengan nyaman** dengan bantuan renovasi hunian layak bagi lansia
4. **Ruang publik dan aktivitas sosial yang ramah lansia diperbanyak, lembaga perawatan lansia ditingkatkan kualitasnya**
5. **Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI dan Polri** (terutama Bintara dan Tamtama)**, mantan atlet nasional serta maestro seniman/budayawan dilindungi oleh jaminan sosial khusus**

Perempuan
Aman dari Kekerasan, Makin Maju Berkarya

1. **Kehamilan dan persalinan sehat diwujudkan**, dimulai dari edukasi kesehatan sejak usia remaja hingga pemberian nutrisi seimbang gratis dan pendampingan ibu hamil sampai 1.000 hari pertama kehidupan anak
2. **Mendukung perempuan di setiap peran** dengan menghadirkan cuti ayah saat istri melahirkan dan mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti hamil bagi dan melahirkan bagi istri
3. **Tempat penitipan anak (*day care*)** berkualitas dan terjangkau, serta **ruang laktasi di setiap ruang publik**
4. **Larangan diskriminasi terhadap perempuan dan dukungan khusus untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga**
5. **Aman dari kekerasan dengan layanan krisis terintegrasi di setiap daerah** (nomor layanan darurat 24 jam, Rumah Aman, visum, pengobatan dan layanan psikologis gratis, bantuan hukum gratis)
6. **Hadirkan dan tegakkan aturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual** untuk melindungi para perempuan
7. **Kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya di berbagai bidang**
8. **Meningkatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)** sebagai aktor penggerak di lingkungan masyarakat

Tenaga Kesehatan Dihargai, Dihormati & Disejahterakan

1. **Pemberian Status Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi Tenaga Kesehatan** sehingga mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional
2. **LPDP Profesi** untuk dokter spesialis, psikolog klinis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang dibutuhkan
3. **Prioritas beasiswa untuk calon tenaga kesehatan** dari keluarga miskin atau kawasan Pesisir, Kepulauan, dan Pedalaman
4. **Meningkatkan peran bidan** untuk kesehatan ibu, bayi dan tumbuh kembang anak
5. **Insentif untuk kader kesehatan** dalam upaya promotif dan preventif kesehatan
6. **Peningkatan kesejahteraan** para tenaga medis dan tenaga kesehatan
7. **Beban administrasi** berkurang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
8. Berbagai kesempatan **peningkatan kompetensi dan pengayaan keilmuan gratis**

Buruh Sejahtera, Ekonomi Adil Untuk Semua

1. **Sistem pengupahan yang adil** bagi buruh dengan mempertimbangkan biaya hidup yang layak
2. **Bantuan pangan murah** untuk buruh
3. **Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan manusiawi**
4. **Perlindungan sosial sepanjang hayat** (melalui BPJS Tenaga Kerja), termasuk **jaminan berserikat dan berpendapat**
5. **Pelatihan gratis dan beasiswa diperbanyak** untuk peningkatan keterampilan buruh
6. **Perlindungan bagi buruh Indonesia dari ancaman TKA** melalui penegakan ketentuan yang berkeadilan
7. **Pelibatan buruh dalam berbagai penentuan kebijakan** yang mempengaruhi kehidupannya

Pekerja Migran Indonesia Terlindungi & Sejahtera

1. **Prioritas penempatan pada negara dengan perjanjian bilateral bidang ketenagakerjaan** untuk memperkuat perlindungan pekerja migran
2. **Pembekalan yang lengkap** untuk calon pekerja migran
3. **Memperbanyak jumlah pekerja migran terampil** melalui pelatihan yang relevan, berkualitas dan terjangkau
4. **Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri**
5. **Pendampingan bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum** berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pekerja migran
6. **Layanan pusat krisis 24 jam terintegrasi** dengan KBRI setiap negara, Kemnaker Indonesia dan Disnaker asal daerah
7. **Perlindungan dan kemudahan bagi para pekerja migran saat mereka kembali ke tanah air** dengan tersedianya pilihan pekerjaan atau tempat berkarya untuk menekuni potensinya
8. Pelatihan dan pendampingan bagi para pekerja migran untuk dapat **mengelola dana dengan baik dan memulai bisnis** yang sesuai dengan bidang dan minatnya

Gen Z dan Milenial: Generasi Emas Bukan Generasi Cemas

1. **Menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan pekerjaan baru,** termasuk pekerjaan hijau/***green jobs***
2. **Mengembangkan kewirausahaan di kalangan Gen Z dan milenial,** melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan
3. **Tersedia berbagai beasiswa di dalam dan di luar negeri**
4. **Menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota,** yang tersambung dengan transportasi umum
5. **Layanan pendidikan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental terjangkau dan mudah diakses**
6. **Terbukanya peluang magang seluas-luasnya di instansi pemerintah, BUMN dan swasta hingga ke luar negeri** bagi Gen Z dan milenial
7. **Dukungan pemerintah bagi *sandwich generation*** melalui penciptaan lapangan kerja dan jaminan hari tua bagi orang tua serta bantuan bagi pelajar

Warga Kota: Hidup Layak, Produktif dan Sejahtera

1. **Harga rumah terjangkau** dengan lokasi dekat pusat kota
2. **Fasilitas pendidikan dan kesehatan, transportasi umum, air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, penanganan banjir, dan internet tersedia dengan akses mudah dan biaya terjangkau**
3. **Taman, perpustakaan, pusat kesenian, dan fasilitas olahraga** yang berkualitas semakin banyak tersedia
4. **Peluang wirausaha dan lapangan kerja dengan upah layak terbuka luas**
5. **Masyarakat merasa aman dan terlindungi** dengan kehadiran aparat yang ramah melayani
6. **Birokrasi melayani yang berorientasi digital dan bebas pungli,** termasuk perizinan dan perlindungan hak atas tanah
7. **Polusi udara, pencemaran air dan pengelolaan sampah terkendali dengan baik**
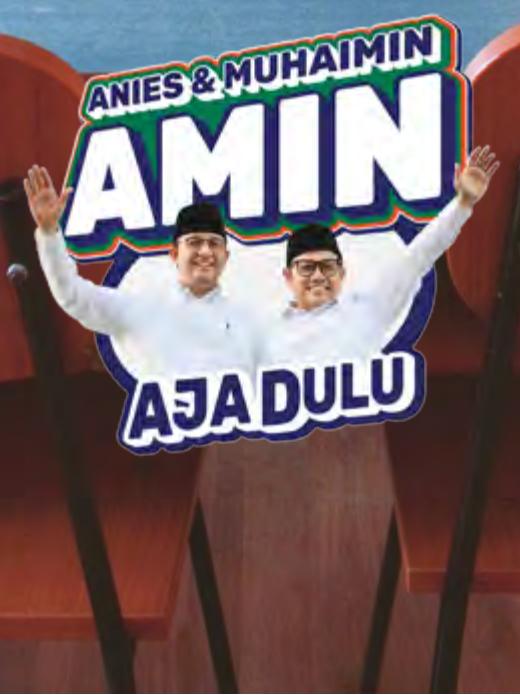
Warga Desa: Maju, Mandiri, dan Sejahtera

1. **Dana desa akan meningkat dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan warga**

2. **Memastikan para Kepala Desa dan Perangkat Desa, terhindar dari politisasi dan kriminalisasi, menuju pembangunan desa yang berorientasi kepada rakyat**

3. **Pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan desa wisata tematik**

4. **Fasilitas pendidikan dan kesehatan, akses jalan, air bersih, sanitasi, pengolahan sampah, irigasi, dan internet berkualitas, tersedia dan terjangkau**

5. **Bangkitnya KUD, BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok usaha, dan kelembagaan perekonomian desa lainnya** untuk meningkatkan ekonomi desa

6. **Tata kelola dan pelayanan pemerintah desa semakin baik** melalui pendampingan yang profesional serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa

7. **Menguatnya akses terhadap tanah dan sumber daya agraria** melalui percepatan program redistribusi tanah, penyediaan skema pemanfaatan hutan dan tanah hak, serta pembangunan infrastruktur berkeadilan

Guru Lega, Siswa Bahagia

1. **Kenaikan status guru honorer** dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) menjadi PPPK, melalui proses yang adil dan transparan
2. **Peningkatan kesejahteraan guru** sekolah negeri
3. **Tunjangan kesejahteraan bagi para pengajar PAUD**
4. **Gaji guru diterima tepat waktu**, tidak terlambat lagi
5. **Insentif penambahan gaji guru swasta** melalui dana bantuan operasional sekolah
6. **Pengurangan beban administrasi** menjadi maksimal 10% dari jam kerja
7. **Mempertahankan kurikulum** yang berlaku dengan penyesuaian terukur
8. **Beasiswa guru dan anak guru** melalui Program Dana Abadi Guru
9. **Perbaikan jenjang karier untuk calon guru baru** dengan pilihan fokus: a) kepemimpinan sekolah; b) spesialis kurikulum dan ilmu pendidikan; atau c) pengajaran
10. **Pemerataan rasio guru** melalui perbaikan data, sistem rekrutmen dan manajemen talent pool

ASN Magnet Talenta Terbaik

1. **Peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem gaji berkeadilan** dan kepastian naik gaji minimal 15% dalam lima tahun
2. **Perluasan manfaat jaminan sosial** dalam hal mengakses hak pada hunian, kesehatan fisik dan mental ASN
3. **Lingkungan kerja yang suportif bagi ASN** melalui cuti haid, cuti hamil, cuti ayah, dan insentif daycare
4. **Peningkatan kuota beasiswa studi lanjut** khusus ASN, di dalam dan luar negeri
5. **Penyederhanaan dan pengurangan beban administratif ASN**
6. **Seleksi dan promosi jabatan yang mengedepankan meritokrasi**
7. **Insentif dan penghargaan bagi ASN berdedikasi dan berprestasi**
8. **Perbaikan manajemen talenta ASN** dengan sistem informasi Satu Data Talenta ASN (talent pool) di seluruh instansi pemerintah K/L/D
9. Perbaikan **pengelolaan dan sistem pensiun**, untuk memastikan para ASN sejahtera di hari tuanya

Dosen & Peneliti
Garda Terdepan Inovasi

1. **Peningkatan dana R&D** dari 0,24% PDB menjadi 0,40 - 0,60% PDB di tahun 2029
2. **Mengurangi beban administrasi para dosen dan peneliti**
3. **Peningkatan penghargaan dan tunjangan bagi para dosen** dan peneliti, berbasis kinerja
4. **Menerapkan dana riset multiyears,** untuk menjamin kepastian prospek riset yang memerlukan durasi panjang
5. **Mengakhiri kerumitan ragam aplikasi** (Sister dan Sijali/ Sijago) melalui integrasi sistem digital
6. **Proses administrasi dan perizinan penelitian dipermudah dan disederhanakan**
7. **Beasiswa untuk dosen dan peneliti semakin diperbanyak,** baik di dalam dan di luar negeri
8. **Penghargaan/Award dari pemerintah untuk para peneliti** berdedikasi dan berprestasi
9. **Memfasilitasi para peneliti untuk melakukan kerjasama riset** dengan pihak lain di luar negeri
10. **Mendorong pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset nasional,** dengan melibatkan swasta dan BUMN
11. Memperbaiki **sistem akuntabilitas terkait pendanaan riset, untuk memfasilitasi riset-riset strategis** tetapi mengandung risiko tinggi untuk gagal
12. **Membangun ekosistem riset yang sehat dan berdaya saing**

Masyarakat Adat Berdaulat dengan Nilai dan Martabat

1. **Memperkuat perlindungan masyarakat adat** terhadap kebutuhan dasar mencakup air bersih, pangan, pendidikan dan fasilitas kesehatan
2. **Penyederhanaan proses administrasi pengakuan legal-formal dan pendaftaran tanah masyarakat adat**
3. **Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah** di level nasional hingga kabupaten/kota
4. **Keterlibatan secara bermakna masyarakat adat dalam pembangunan**
5. **Menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal**

Pers dan Media
Tulang Punggung Demokrasi

1. **Revisi berbagai aturan yang menghambat kebebasan pers dan sipil**
2. Memfasilitasi **tumbuhnya ekosistem industri pers nasional yang sehat dan kuat, serta mampu bersaing dengan media asing berbasis teknologi**, melalui dukungan kebijakan dan pendekatan fiskal
3. **Menindak tegas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers**
4. **Dukungan regulasi terkait kompensasi yang adil** demi ekosistem pers yang sehat
5. **Menjamin akses pers terhadap data, informasi, dan dokumen publik milik pemerintah**
6. **Kebebasan berserikat bagi seluruh insan pers**
7. **Menempatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah** dan mengedukasi publik dan mengawal demokrasi
8. **Memelopori keterbukaan pemerintah terhadap kritik pers,** dimulai dengan contoh dari pemerintahan tingkat tertinggi

Diaspora: Berdaya dan Bahagia di Dunia

1. Membuat ***talent pool* diaspora** sebagai wadah talenta diaspora untuk posisi pekerjaan dengan kualitas dan kompensasi kompetitif di Indonesia
2. Meningkatkan kolaborasi industrialisasi dan riset dengan diaspora sebagai bagian dari **transfer teknologi**
3. Menginisiasi program **Bangga *Brand* Indonesia** yang memberikan insentif bagi diaspora pegiat UMKM dan industri kreatif
4. Menciptakan kondisi aman bagi diaspora karena ada **perlindungan negara** bagi diaspora yang mengalami ketidakadilan hukum
5. Menciptakan **situasi "pergi tenang, pulang nyaman"** dengan peningkatan perjanjian bebas visa dan kemudahan prosedur imigrasi dan bea cukai di Indonesia
6. Memberi peran strategis bagi diaspora terlibat dalam **diplomasi untuk mempromosikan *brand* Indonesia**
7. Memfasilitasi diaspora yang ingin **berkontribusi untuk negeri**

Investor & Pelaku Pasar Modal/Uang

Aman & Nyaman, Industri Keuangan Tumbuh & Berkembang

1. **Perlindungan investor** melalui penegakan hukum di pasar modal dan sektor keuangan, termasuk sanksi berat kepada oknum dibalik pinjaman online ilegal, investasi bodong, asuransi ilegal, dan produk ilegal lainnya
2. **Perluasan basis investor** dengan memfasilitasi **Gen-Z dan Milenial** untuk mendapatkan manfaat berinvestasi di pasar modal, termasuk melalui aktivitas edukasi, promosi, dan memfasilitasi hadirnya produk investasi yang sesuai
3. **Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal**, untuk menstimulus pertumbuhan sektor keuangan khususnya pasar modal, asuransi, sukuk, dan reksadana
4. **Penyesuaian regulasi dalam bidang investasi** guna memberikan fleksibilitas bagi institusi Pemerintah dan institusi terafiliasi dengan Pemerintah untuk berinvestasi di bursa efek
5. **Menjaga agar tingkat inflasi rendah dan stabil**, serta suku bunga perbankan yang kompetitif, untuk menggerakkan sektor riil dan menstimulus pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan
6. **Penguatan literasi keuangan masyarakat**, melalui kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Dunia Pendidikan
7. **Penyusunan regulasi sektor keuangan akan melibatkan para pelaku pasar**, untuk memastikan kebijakan yang relevan dan optimal
8. **Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar regulasi** di sektor keuangan dan pasar modal

ANIES - MUHAIMIN

AMIN 2024

Penutup

Indonesia Emas 2045 mungkin terlihat seperti fatamorgana. Sebagian menyebutnya utopia yang tak mungkin dicapai. Sebagian lagi menganggapnya sebagai medan perjuangan sekaligus ladang pahala. Ada begitu banyak jiwa-raga anak bangsa Indonesia yang siap menapaki jalan mendaki sebuah perjuangan baru. Mereka yang mewarisi tekad besar para pejuang kemerdekaan yang gagah berani melawan penjajahan, kemiskinan, dan kebodohan. Kekurangan di sana-sini tidak menyurutkan langkah. Dan kami yakin Anda adalah bagian dari tekad itu. Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI, kami ajak Anda bergabung untuk menghimpun kekuatan. Berikhtiar bersama, kita akan meraih kejayaan bangsa dan negara Indonesia dengan semangat perubahan. Berbekal hikmah dari masa lalu dan optimisme memandang masa depan, kita bawa bangsa ini menerobos segala keterbatasan, tantangan, dan meraih peluang untuk kemajuan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih!

Lampiran

TARGET AMIN 2025-2029

PERTUMBUHAN PDB (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
5,17% (2028); 5,02% (2019); -2,07% (2020); 3,69% (2021); 5,31% (2022)
TARGET AMIN
RATA-RATA 5,5%-6,5% PER-TAHUN (2025-2029)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

FEBRUARI, BPS

ANGKA HISTORIS
5,01% (2019); 4,94% (2020); 6,26% (2021); 5,83% (2022); 5,45% (2023)
TARGET AMIN
3,5%-4,0% (2029)

TINGKAT KEMISKINAN (%)

MARET, BPS

ANGKA HISTORIS
9,41% (2019); 9,78% (2020); 10,14% (2021); 9,54% (2022); 9,36% (2023)
TARGET AMIN
4,0%-5,0% (2029)

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM (%)

MARET, BPS

ANGKA HISTORIS
3,63% (2019); 2,70% (2020); 2,16% (2021); 2,04% (2022); 1,12% (2023)
TARGET AMIN
~0% (2026)

TINGKAT INFLASI (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
2,72% (2019); 1,68% (2020); 1,87% (2021); 5,51% (2022)
TARGET AMIN
RATA-RATA 2,0-3,0% PER-TAHUN (2025-2029)

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (JUTA)

BPS

ANGKA HISTORIS
13,68 JUTA (2010-2014); 13,52 JUTA (2015-2019)
TARGET AMIN
LEBIH DARI 15 JUTA (2025-29)

RASIO PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP TOTAL PEKERJA (%)

FEBRUARI, BPS

ANGKA HISTORIS
58,22% (2018); 57,27% (2019); 56,50% (2020); 59,54% (2021); 59,31% (2022); 60,12% (2023)
TARGET AMIN
50,0% (2029)

INDEKS GINI

BPS

ANGKA HISTORIS
0,382 (2019); 0,381 (2020); 0,384 (2021); 0,384 (2022); 0,388 (2023)
TARGET AMIN
0,36-0,37 (2029)

KONTRIBUSI INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
19,86% (2018); 19,70% (2019); 19,87% (2020); 19,24% (2021); 18,34% (2022)
TARGET AMIN
22,0%-23,0% (2029)

TAX RATIO (%)

KEMENKEU

ANGKA HISTORIS
14% (2012); 9,77% (2019); 8,33% (2020); 9,11% (2021); 10,4% (2022)
TARGET AMIN
13,0-16,0% (2029)

RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB (%)

KEMENKEU

ANGKA HISTORIS
30,6% (2019); 39,8% (2020); 41,2% (2021); 40,9% (2022); 38,1% (2023)
TARGET AMIN
KURANG DARI 30,0% (2029)

INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

BPS, BAPPENAS, DAN BERBAGAI SUMBER

ANGKA HISTORIS
4,6 (1967-1999); 4,6 (2000-2004); 4,0 (2005-2009); 4,1 (2010-2004); 6,5 (2015-2019); 7,3 (2021-2022)
TARGET AMIN
5,0 (2029)

LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)

WORLD BANK

ANGKA HISTORIS
2,76 (2010); 2,94 (2012); 2,98 (2016); 3,15 (2018); 3,0 (2023) RANKING 2023: 63 DARI 139 NEGARA
TARGET AMIN
3,5 (2029) **RANKING 2029: 35-40 DARI 139 NEGARA**

BIAYA LOGISTIK (DOMESTIK+EKSPOR) TERHADAP PDB (%)

WB, PWC, BERBAGAI SUMBER

ANGKA HISTORIS
26,0% (2004-2011); 22% (2016); 23.5% (2018); 23.5% (2019); 23,8% (2020)
TARGET AMIN
16,0%-18,0% (2029)

BACKLOG KEPEMILIKAN RUMAH (JUTA UNIT)

PUPR

ANGKA HISTORIS
12,16 JT (2018); 12,14 JT (2019); 12,74 JT (2020); 12,71 JT (2021); 10,5 JT (2022)
TARGET AMIN
8,0 JUTA (2029)

PREVALENSI STUNTING (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
37,2% (2013); 27,67% (2019); 24,4% (2021); 22,6% (2022)
TARGET AMIN
11,0%-12,5% (2029)

ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN (AKI)

WORLD BANK

ANGKA HISTORIS
194 (2017); 181 (2018); 158 (2019); 173 (2020); 183 (2022)
TARGET AMIN
115-125 (2029)

ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN SELAMAT (AKB)

BPS

ANGKA HISTORIS
19,1 (2017); 18,6 (2018); 18,1 (2019); 17,6 (2020); 17,2 (2021); 16,9 (2022)
TARGET AMIN
10,0-12,0 (2029)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

BPS

ANGKA HISTORIS
70,81 (2017); 71,39 (2018); 71,92 (2019); 71,94 (2020); 72,29 (2021); 72,91 (2022)
TARGET AMIN
74,0-75,0 (2029)

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KEMENAG

ANGKA HISTORIS
72,27 (2017); 70,9 (2018); 73,83 (2019); 67,46 (2020); 72,39 (2021)
TARGET AMIN
75,0-78,0 (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD (%),

BPS

ANGKA HISTORIS
33,84 (2017); 37,92 (2018); 36,93 (2019); 37,52 (2020); 35,59 (2021); 35,28 (2022)
TARGET AMIN
70-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SD/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
108,50 (2017); 108,61(2018); 107,46 (2019); 106,32 (2020); 106,20 (2021); 106,27 (2022)
TARGET AMIN
108%-110% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SMP/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
90,23 (2017); 91,52 (2018); 90,57(2019); 92,06 (2020); 92,80 (2021); 92,11(2022)
TARGET AMIN
93%-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
82,84 (2017); 80,68 (2018); 83,98 (2019); 84,53 (2020); 85,23 (2021); 85,49 (2022)
TARGET AMIN
87-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TINGGI (%)

BPS

ANGKA HISTORIS
25 (2017); 25,12 (2018); 25,13 (2019); 25,5 (2020); 26,09 (2021); 26,3 (2022)
TARGET AMIN
30%-40% (2029)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

BPS

ANGKA HISTORIS
12,85 (2017); 12,91 (2018); 12,95 (2019); 12,98(2020); 13,08 (2021); 13,1 (2022)
TARGET AMIN
13,4-13,8 TAHUN (2029)

ANGGARAN R&D TERHADAP PDB (%)

R&D WORLD

ANGKA HISTORIS
0,27% (2019); 0,28% (2020); 0,24% (2021);
TARGET AMIN
0,4%-0,6% (2029)

INDEKS DEMOKRASI

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

ANGKA HISTORIS

7,03 (2015); 6,48 (2019); 6,30 (2020); 6,71 (2021); 6,71 (2022)

TARGET AMIN

7,30-7,50 (2029)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ANGKA HISTORIS

32 (2012); 40 (2019); 37 (2020); 38 (2021); 34 (2022)

TARGET AMIN

44-46 (2029)

INDEKS KEBEBASAN PERS

REPORTER WITHOUT BORDERS

ANGKA HISTORIS

63,23 (2019); 63,18 (2020); 62,6 (2021); 49,27 (2022); 54,83 (2023).

CATATAN: 40-55: DIFFICULT SITUATION

TARGET AMIN

70-72 (2029)

CATATAN: 70-85: SATISFACTORY

KONTRIBUSI EBT TERHADAP TOTAL ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (%)

KESDM

ANGKA HISTORIS

6,7% (2017); 8,6% (2018); 9,2% (2019); 11,3% (2020); 12,2% (2021); 14,1% (2022)

TARGET AMIN

22%-25% (2029)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

KLHK

ANGKA HISTORIS

65,1 (2018); 66,55 (2019); 70,27 (2020); 71,43 (2021); 72,4 (2022)

TARGET AMIN

73-75 (2029)

Indonesia Adil
Makmur **Untuk Semua**
ANIES RASYID BASWEDAN & ABDUL MUHA**IMIN** ISKANDAR
ANIES & MUHAIMIN
AMIN
AJA DULU
Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN
PKB
PKS